

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Provinsi Sulawesi Selatan

Secara Geografis, Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kota Makassar sebagai Ibu Kota terletak di tengah-tengah Kepulauan Indonesia sehingga memiliki posisi strategis dari segi ekonomi dimana Kota Makassar telah pula ditetapkan sebagai pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia (KTI), selain itu Selat Makassar telah pula menjadi salah satu jalur pelayaran internasional.

Geografis

Provinsi Sulawesi Selatan terletak pada bagian selatan Pulau Sulawesi dengan luas wilayah kurang lebih **46.083,94** Km² yang terdiri dari **21** Kabupaten dan **3** Kota, **304** Kecamatan dan **2.953** desa/kelurahan memiliki luas wilayah kurang lebih **46.083,94 km²** sebagaimana yang terdapat pada Tabel I-1.

Tabel I-1
Luas Daerah serta Pembagian Daerah Administrasi
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan

No	Kabupaten/Kota	Luas Area Km ²	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan
1	Kabupaten Kepulauan Selayar	1.199,91	11	74
2	Kabupaten Bulukumba	1.170,10	10	126
3	Kabupaten Bantaeng	397,06	8	67
4	Kabupaten Jeneponto	837,99	11	113
5	Kabupaten Takalar	620,26	9	83
6	Kabupaten Gowa	1.802,08	18	167
7	Kabupaten Sinjai	924,15	9	80
8	Kabupaten Maros	1.538,44	14	103
9	Kabupaten Pangkep	814,95	13	102
10	Kabupaten Barru	1.192,39	7	54
11	Kabupaten Bone	4.593,38	27	372
12	Kabupaten Soppeng	1.337,99	8	70

13	Kabupaten Wajo	2.394,15	14	176
14	Kabupaten Sidrap	2.081,01	11	105
15	Kabupaten Pinrang	1.892,42	12	104
16	Kabupaten Enrekang	1.821,41	12	129
17	Kabupaten Luwu	2.940,51	21	227
18	Kabupaten Tana Toraja	2.149,67	19	159
19	Kabupaten Luwu Utara	7.365,51	11	176
20	Kabupaten Luwu Timur	7.365,51	11	102
21	Kabupaten Toraja Utara	1.169,95	21	151
22	Kota Makassar	181,35	14	143
23	Kota Parepare	88,92	4	22
24	Kota Palopo	254,57	9	48
Sulawesi Selatan		46.083,94	304	2.953

Sumber: BPS Sulsel

Penduduk

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan, pertumbuhan penduduk pada Tahun 2014 mencapai 1,13 persen. Jumlah Penduduk Sulawesi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 mencapai 8.432.163 jiwa. Sebagaimana yang ditunjukkan pada Tabel I-2, nampak bahwa hingga Tahun 2014 penduduk Sulawesi Selatan terkonsentrasi di Kota Makassar yakni sebesar 1.429.242 jiwa, sementara itu Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan daerah yang memiliki jumlah penduduk terkecil yakni hanya 128.744 jiwa.

Tabel I-2

Jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014

No	Kabupaten/Kota	Jumlah (jiwa)
1	Kabupaten Kepulauan Selayar	128.744
2	Kabupaten Bulukumba	407.775
3	Kabupaten Bantaeng	182.283
4	Kabupaten Jeneponto	353.287

5	Kabupaten Takalar	283.762
6	Kabupaten Gowa	709.386
7	Kabupaten Sinjai	236.497
8	Kabupaten Maros	335.596
9	Kabupaten Pangkep	320.293
10	Kabupaten Barru	170.316
11	Kabupaten Bone	738.515
12	Kabupaten Soppeng	225.709
13	Kabupaten Wajo	391.980
14	Kabupaten Sidrap	286.610
15	Kabupaten Pinrang	364.087
16	Kabupaten Enrekang	198.194
17	Kabupaten Luwu	347.096
18	Kabupaten Tana Toraja	227.588
19	Kabupaten Luwu Utara	299.989
20	Kabupaten Luwu Timur	269.405
21	Kabupaten Toraja Utara	224.003
22	Kota Makassar	1.429.242
23	Kota Parepare	136.903
24	Kota Palopo	164.903
Sulawesi Selatan		8.432.163

Sumber : BPS Sulsel

Organisasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, hingga Tahun 2014 telah ditetapkan 1.444 jabatan struktural dalam lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Jumlah jabatan struktural tersebut tersebar pada berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, hingga Tahun 2014 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memiliki 47 SKPD dan 105 Unit Pelaksana Teknis Dinas maupun Badan. Di samping Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, dalam struktur organisasi

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terdapat pula kelompok jabatan struktural Staf Ahli dimana sesuai Peraturan Daerah tentang Organisasi Pemerintah Provinsi terdapat 5 (lima) jabatan staf ahli yakni, 1) Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik, 2) Staf Ahli Bidang Pemerintahan, 3) Staf Ahli Bidang Pembangunan, 4) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, 5) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Kepegawaian

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2014 sebanyak 9.990 orang. Dari jumlah tersebut 5.200 adalah pegawai laki-laki dan 4.790 pegawai perempuan. Jika diamati menurut golongan kepangkatan, jumlah pegawai golongan III paling banyak, yaitu 5.429 orang, menyusul golongan II sebesar 2.697 orang dan golongan IV sebanyak 1.595 orang, sedangkan sisanya 269 orang adalah pegawai golongan I.

B. Posisi Strategis Provinsi Sulawesi Selatan

Kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dituangkan dalam Visi yaitu “ ***Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan pada Tahun 2018*** ”

Pilar Utama Pembangunan Nasional yaitu gambaran tentang kondisi Sulawesi Selatan pada Tahun 2018 yang menjadi acuan dan berkontribusi nyata terhadap solusi persoalan mendasar bangsa Indonesia khususnya dalam perwujudan ketahanan dan kemandirian pangan pada komoditas strategis. Ini ditandai dengan posisi Sulawesi Selatan yang semakin menempatkan dirinya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi luar pulau Jawa. Ini juga terkait dengan perwujudan pola ideal kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama, ketertiban dan keamanan serta akselerasi perbaikan kehidupan demokrasi.

Simpul Jejaring yaitu gambaran tentang kondisi Sulawesi Selatan pada Tahun 2018 yang menjadi simpul distribusi barang dan jasa, simpul layanan pendidikan dan kesehatan, serta simpul distribusi perhubungan darat, laut dan udara di luar Jawa dan kawasan timur Indonesia khususnya.

Akselerasi Kesejahteraan yaitu gambaran tentang kondisi Sulawesi Selatan pada Tahun 2018 yang sudah mencapai fase akhir tinggal landas dan memasuki awal kematangan ekonomi. Pada saat ini Indeks Pembangunan Manusia berada pada kategori menengah-tinggi. Pembangunan Ekonomi berada di atas rata-rata Nasional, pendapatan per kapita sekitar Rp. 30 Juta. Angka Kemiskinan dan pengangguran di bawah rata-rata Nasional, agroindustri berkembang pesat serta industri dan jasa berkontribusi signifikan dalam perekonomian. Ini ditandai oleh kondisi dinamis Sulawesi Selatan semakin kuat mensinergikan kemajuan Kabupaten dan Kota serta semakin bersinergi dengan perkembangan regional, nasional dan internasional.

Untuk mewujudkan Visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tersebut didukung oleh misi sebagai upaya-upaya umum dalam pencapaian visi yaitu :

1. Mendorong semakin meningkatnya masyarakat yang religius dan kerukunan intra dan antar umat beragama.
2. Meningkatkan kualitas kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan.
3. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
4. Meningkatkan daya saing daerah dan sinergitas regional, nasional dan global.
5. Meningkatkan kualitas demokrasi dan kepastian hukum.
6. Meningkatkan kualitas ketertiban, keamanan dan kesatuan bangsa.
7. Meningkatkan perwujudan pemerintahan yang baik dan bersih.

C. *Issu-Issu Strategis yang dihadapi*

1. Masih tingginya angka buta aksara serta angka partisipasi sekolah yang cenderung menurun, Standar Pelayanan Minimal pendidikan belum tercapai, belum optimalnya aksesibilitas, sarana dan prasarana dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
2. Terbatasnya sumber daya kesehatan, belum optimalnya pelayanan kesehatan, masih adanya ancaman penyakit menular dan tidak menular serta meningkatnya penyakit degeneratif, kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

3. Belum optimalnya kinerja sarana dan prasarana sumber daya air untuk mendukung ketahanan pangan Sulsel, menurunnya kualitas dan kapasitas sumber air baku, rendahnya akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak,
4. Belum meratanya akses transportasi, tingkat kerusakan jalan, jembatan dan jaringan irigasi yang masih tinggi.
5. Belum optimalnya pengelolaan investasi, iklim investasi masih belum kondusif khususnya dalam hal perizinan.
6. Pemberdayaan koperasi UMKM untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, Industri berbasis sumberdaya lokal belum berkembang secara merata, masih kurangnya kualitas manajemen pengelolaan usaha bagi UMKM.
7. Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk
8. Masih terbatasnya lapangan kerja dan kualitas serta daya saing tenaga kerja belum sesuai dengan kebutuhan pasar.
9. Belum optimalnya diversifikasi produk pangan lokal, pengembangan penyediaan sarana dan prasarana pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan untuk mendukung produksi dan produktivitas.
10. Luas hutan semakin berkurang akibat adanya kegiatan penambangan, luas lahan kritis masih cukup banyak, adanya alih fungsi lahan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013. RPJMD ini merupakan penjabaran visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan.

Berdasarkan Visi, Misi dan Prioritas RPJMD Sulawesi Selatan khususnya terkait uraian 11 (sebelas) program prioritas Gubernur dalam RPJMD 2013-2018, maka untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat diperlukan upaya percepatan untuk mendorong perluasan pertumbuhan ekonomi yang mengedepankan distribusi pendapatan yang lebih merata dan berkeadilan. maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 menekankan pada beberapa prioritas pembangunan yaitu; Peningkatan Kualitas Pelayanan Kebutuhan Dasar, Peningkatan Mutu dan Produktifitas Hasil Pertanian, Mendorong Industri Pengolahan Berbasis Sumberdaya Lokal, Peningkatan Kualitas dan Perluasan Kesempatan Kerja, Mengefektifkan Kelembagaan Ekonomi yang Berbasis Masyarakat, Perluasan Infrastruktur Wilayah dan Ketersediaan Energi., Penguatan Ekonomi Wilayah didukung oleh Peningkatan Produksi Pertanian Berbasis Masyarakat, Peningkatan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Gerakan Sulsel Hijau (*go green*). Sasaran pembangunan diharapkan dicapai pada setiap prioritas di mana target sarannya ditetapkan dengan melihat hasil capaian Tahun-Tahun sebelumnya. Berlandaskan hal tersebut, maka ditetapkan beberapa indikator makro yang diharapkan dapat dicapai pada Tahun 2014 sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas Pelayanan Kebutuhan Dasar

Sasaran Indikator Kinerja yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya Angka Harapan Hidup sampai dengan 71,3 Tahun
- 2) Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) 50-55 per 100.000 Kelahiran
- 3) Meningkatnya Persentase Cakupan Air Bersih Terlayani sebesar 85 persen Rumah Tangga di Pedesaan

- 4) Meningkatnya Angka Rata–Rata Lama Sekolah sampai dengan 8,00 Tahun
- 5) Meningkatnya mutu pendidikan, dengan membaiknya indikator persentase kelulusan dalam pelaksanaan ujian nasional, dengan tingkat capaian 100 persen
- 6) Berkurangnya jumlah penduduk kurang pangan dan gizi, yang dicerminkan prevalensi gizi kurang pada anak balita dibawah 13 persen.
- 7) Berkurangnya jumlah penduduk kurang pangan dan gizi, yang dicerminkan prevalensi gizi buruk pada angka di bawah 4 persen.
- 8) Meningkatnya persentase Angka Melek Huruf sebesar 90,14 persen
- 9) Meningkatnya persentase lingkungan/perumahan sehat, sanitasi dan air bersih dengan indikator capaian berupa persentase layanan air bersih di perkotaan sebesar 90 persen Rumah Tangga
- 10) Layanan perbaikan lingkungan/perumahan sehat serta sanitasi sebesar 85 persen.
- 11) Persentase layanan perbaikan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat sebesar 56 persen pada rumah tangga.

2. Meningkatnya Mutu dan Produktivitas Hasil Pertanian

Sasaran Indikator Kinerja yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya produksi beras, dengan sasaran surplus beras (over stock) mencapai 2,2 - 2,3 juta ton;
- 2) Meningkatnya jumlah produksi jagung mencapai 1,5 – 1,6 juta ton;
- 3) Meningkatnya jumlah populasi ternak sapi 1,45 – 1,55 juta ekor;
- 4) Meningkatnya jumlah produksi Udang segar mencapai 33.200-33.300 ton ;
- 5) Meningkatnya persentase ekstensifikasi dan diversifikasi pada areal pengelolaan lahan pertanian (jaringan irigasi) sebesar 83 persen;
- 6) Meningkatnya jumlah produksi Coklat mencapai 216.602 ton;
- 7) Meningkatnya jumlah Produksi Rumput Laut diatas 2 juta ton;

- 8) Terpenuhinya kebutuhan Sarana Produksi Pertanian dan Perikanan berupa penyediaan alat dan mesin pertanian sebanyak 236.034 unit;
- 9) Menurunnya luas kerusakan hutan hingga 276.900 Ha dari luas Hutan 2.725.796 Ha.

3. Terdorongnya Industri Pengolahan Berbasis Sumber Daya Lokal

Sasaran Indikator Kinerja yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya Jumlah Investasi (ADHB) mencapai 55-60 Triliun Rupiah;
- 2) Nilai PDRB (ADHB) mencapai 210 Triliun Rupiah;
- 3) Jumlah Pendapatan Perkapita (ADHB) dapat mencapai 23-24 juta Rupiah;
- 4) Paritas Daya Beli mencapai 649.400 Rupiah atau mencapai Indeks 66,9 persen;
- 5) Target Pertumbuhan Ekonomi diharapkan mencapai 7,8 - 8 persen;
- 6) Pertumbuhan Industri Pengolahan mencapai 2 - 4 persen;
- 7) Meningkatnya Nilai Ekspor Perdagangan mencapai 1,68 Milyar US Dolar;
- 8) Persentase Pertumbuhan Sektor Pertanian diharapkan mencapai 5.51 persen;
- 9) Jumlah kunjungan Wisatawan Mancanegara mencapai 115.000 kunjungan;
- 10) Jumlah kunjungan Wisatawan Nusantara mencapai 5.250.000 kunjungan;
- 11) Jumlah objek wisata yang telah difasilitasi untuk menjadi destinasi pengembangan Obyek Wisata Unggulan Sulawesi Selatan sebanyak 4 obyek.

4. Meningkatnya Kualitas dan Meluasnya Kesempatan Kerja

Sasaran Indikator Kinerja yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

- 1) Menurunnya angka pengangguran terbuka hingga 5,7 persen;
- 2) Menurunnya jumlah penduduk miskin hingga 7 - 8 persen;
- 3) Pertumbuhan penduduk 1,2 persen (8,34 juta jiwa)

- 4) Meningkatnya persentase Angkatan Kerja yang bekerja diharapkan di atas 2 - 3 persen (usia 15 ke atas);
- 5) Meningkatnya jumlah Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dalam mengoptimalkan fungsi Latihan Kerja sebanyak 4 LPK;
- 6) Meningkatnya jumlah penempatan Tenaga Kerja untuk memperluas kerjasama dengan Dunia Usaha terkait peluang Tenaga Kerja sebanyak 100.000 orang Tenaga Kerja
- 7) Tersedianya data dan informasi pasar kerja yang dapat diakses oleh pencari kerja (Infoemasi Pasar Tenaga Kerja) di 24 Kabupaten dan Kota;
- 8) Meningkatnya keterampilan dan skill pencari kerja dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat) sebanyak 600 orang.

5. Efektifnya Kelembagaan Ekonomi Berbasis Masyarakat

Sasaran Indikator Kinerja yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya jumlah wirausaha dalam pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Koperasi dan UMKM sebanyak 72.405 orang;
- 2) Meningkatnya jumlah promosi dalam membangun mekanisme perdagangan dan kelembagaan pasar yang sehat dan berpihak pada pelaku usaha sebanyak 4 kali promosi;
- 3) Jumlah SDM pelaku UKM serta Koperasi yang mengikuti Diklat sebanyak 6.500 orang;
- 4) Jumlah UMKM Mandiri sebanyak 1.650 unit usaha
- 5) Jumlah Koperasi dan UMKM yang terfasilitasi oleh lembaga keuangan bank dan non bank sebanyak 150.150 unit
- 6) Jumlah produk baru yang difasilitasi sarana dan prasarana dan mendapatkan HAKI yang mengatur pengembangan dan pembinaan Koperasi dan UMKM sebanyak 101 produk.

6. Terluasnya Infrastruktur Wilayah dan Ketersediaan Energi

Sasaran Indikator Kinerja yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

- 1) Persentase kondisi kemantapan dan kualitas jalan sebesar 82,50 persen;
- 2) Persentase kinerja kapasitas dan kualitas jaringan jalan sebesar 85,79 persen;
- 3) Persentase perwujudan pembangunan sarana dan prasarana angkutan darat sebesar 10 persen;
- 4) Persentase peningkatan kualitas dan kapasitas prasarana dan fasilitas bandara udara sebesar 72 persen;
- 5) Jumlah peningkatan kualitas lingkungan perumahan pada kawasan permukiman sebanyak 18 kawasan permukiman;
- 6) Jumlah penyediaan dan pengelolaan Air Baku guna mendukung ketahanan pangan dengan target 120 Embung, 2 cek Dam, 2 Bangunan Pelindung;
- 7) Persentase Rumah Tangga menggunakan jangkauan layanan air bersih sebesar 83,26 persen;
- 8) Persentase Rumah Tangga terhadap akses prasarana sanitasi yang layak sebesar 76,78 persen;
- 9) Persentase Rumah Tangga ketaatan energi yang ditunjang dengan penyediaan listrik sebesar 67,00 persen;
- 10) Kapasitas ketersediaan jaringan irigasi seluas 74.234 Ha;
- 11) Jumlah pengamanan dalam pengendalian banjir dan pengamanan pantai dengan target 1.500 bronjong, 20.000 karung plastik berisi pasir;

7. Menguatnya Ekonomi Wilayah dan Meningkatnya Produksi Berbasis Masyarakat

Sasaran Indikator Kinerja yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

- 1) Supporting pertumbuhan agroindustri yang berbasis sumber daya lokal di 4 kabupaten dan kota;

- 2) Jumlah pengembangan lembaga ekonomi pedesaan/lokal berbasis masyarakat sebanyak 226 BUMDES;
- 3) Jumlah kelompok tani yang menjalankan usaha agrobisnis pedesaan sebanyak 10 kelompok tani;
- 4) Jumlah kerjasama antar kawasan andalan 1 MoU;

8. Meningkatnya Pengelola Sumber Daya Alam dan Gerakan Sulsel Hijau

Sasaran Indikator Kinerja yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

- 1) Persentase pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dengan target 20 persen;
- 2) Persentase pengembangan kapasitas dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan target 20 persen
- 3) Fasilitasi pembangunan perhutanan sosial dalam peningkatan kualitas pengelolaan hutan berbasis pemberdayaan masyarakat seluas 4.000 Ha;
- 4) Rehabilitasi lahan kritis dalam peningkatan kualitas pengelolaan hutan seluas 469.885 Ha;
- 5) Persentase peningkatan kapasitas perlindungan dan pengamanan hutan dan konservasi SDA sebesar 20 persen;
- 6) Pemeliharaan batas kawasan hutan sebesar 300 Km;
- 7) Pengendalian kebakaran kerusakan hutan dan lahan seluas 360,78 Ha;
- 8) Koordinasi peningkatan kualitas pengelolaan B3 dan limbah B3 di 9 Kabupaten dan Kota;

Adapun matriks Penetapan Kinerja bersama Indikator Kinerja dan Target Kinerja Tahun 2014 dapat dilihat dari Tabel II-1 sebagai berikut :

Tabel II-1
Lampiran Penetapan Kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2014

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kebutuhan Dasar	Angka Harapan Hidup	71,3 Tahun
		Angka kematian Ibu (AKI)	50 - 55 per 100.000 kelahiran hidup
		Persentase Cakupan Air Bersih	85 persen RT di Perdesaan
		Angka Rata-Rata Lama Sekolah	8,00 Tahun
		Persentase Kelulusan dalam Ujian Nasional	100 persen
		Prevalensi Gizi Kurang pada Anak Balita	13 persen
		Prevalensi Gizi Buruk	4 persen
		Angka Melek Huruf	90,14 persen
		Persentase Layanan Air Bersih di perkotaan	90 persen RT
		Persentase Perbaikan lingkungan/perumahan Sehat serta Sanitasi	85 persen
		Persentase perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	56 persen pd RT
2	Meningkatnya Mutu dan Produktivitas Hasil Pertanian	Jumlah Surplus Beras (Over Stock)	2,2 - 2,3 juta ton
		Jumlah Produksi Jagung	1,5 - 1,6 juta ton
		Jumlah Populasi Ternak Sapi	1,45 -1,55 juta ekor

		Jumlah Produksi Udang Segar	33.200-33.300 ton
		Persentase ekstensifikasi dan diversifikasi pada areal pengelolaan lahan pertanian (jaringan irigasi)	83 persen
		Jumlah Produksi Coklat	Mencapai 216.602 ton
		Jumlah Produksi Ruput Laut	Di atas 2 juta ton
		Penyediaan alat dan mesin pertanian dalam pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana produksi pertanian	236.034 unit
		Luas kerusakan hutan turun hingga	276.900 Ha dari luas Hutan 2.725.796 Ha
3	Terdorong Industri Pengolahan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Investasi (ADHB)	55-60 trilyun rupiah
		Nilai PDRB (ADHB)	210 trilyun rupiah
		Jumlah pendapatan perkapita (ADHB)	23- 24 juta rupiah
		Indeks paritas Daya Beli	649.400 rupiah mencapai indeks 66,9 persen
		Persentase pertumbuhan Ekonomi	7,8 - 8 persen
		Peningkatan pertumbuhan industri pengolahan	2 - 4 persen
		Peningkatan nilai ekspor perdagangan	1,68 milyar USD
		Persentase pertumbuhan sektor pertanian	5,51 persen
		Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	115.000 kunjungan
		Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	5.250.000 kunjungan

		Jumlah obyek yang telah difasilitasi untuk menjadi destinasi pengembangan obyek wisata unggulan sulsel	4 obyek
4	Meningkatnya Kualitas dan Meluasnya Kesempatan Kerja	Penurunan angka pengangguran terbuka hingga	5,7persen
		Penurunan jumlah penduduk miskin	7 – 8 persen
		Pertumbuhan penduduk	1,2 persen (8,34 juta jiwa)
		Persentase angkatan kerja yang bekerja	Di atas 2 - 3 persen
		Jumah LPK dalam mengoptimalkan fungsi balai latihan kerja/lembaga pelatihan kerja (LPK)	4 LPK
		Jumlah penempatan Tenaga Kerja untuk memperluas kerjasama dengan dunia usaha terkait peluang Tenaga Kerja	100.000 orang
		Penyediaan data dan informasi pasar kerja yang dapat di akses oleh pencari kerja (Informasi Pasar Tenaga Kerja)	24 Kab/kota
		Jumlah pencari kerja mengikuti diklat untuk peningkatan keterampilan dan skill	600 orang
5	Efektifnya Kelembagaan Ekonomi Berbasis Masyarakat	Jumlah wirausaha dalam pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif koperasi dan UMKM	72.405 orang
		Jumlah promosi produksi dalam membangun mekanisme perdagangan dan kelembagaan pasar yang sehat dan berpihak pada pelaku usaha	4 kali promosi
		Jumlah SDM pelaku UKM serta koperasi mengikuti diklat	6.500 orang
		Jumlah UMKM Mandiri	1.650 unit usaha

		Jumlah koperasi dan UMKM yang terfasilitasi oleh lembaga keuangan bank dan non bank	150.150 unit
		Jumlah produk baru yang difasilitasi sarana dan prasarana dan mendapatkan HAKI yang mengatur pengembangan dan pembinaan koperasi dan UMKM	101 produk
6	Terluasnya Infra- struktur Wilayah & Ketersediaan Energi	Persentase kondisi kemantapan dan kualitas jalan	82,50 persen
		Persentase kinerja kapasitas dan kualitas jaringan jalan	85,79 persen
		Persentase perwujudan pembangunan sarana dan prasarana angkutan darat	10 persen
		Persentase peningkatan kualitas dan kapasitas	72 persen
		Jumlah peningkatan kualitas lingkungan perumahan pada kawasan permukiman	18 kawasan permukiman
		Jumlah penyediaan dan pengolahan Air baku guna mendukung ketahanan pangan	120 embung, 2 cek dam, 2 bangunan pelindung
		Persentase rumah tangga menggunakan jangkauan layanan air bersih	83,26 persen
		Persentase rumah tangga terhadap akses prasarana sanitasi yang layak	76,78 persen
		Persentase rumah tangga serta ketataan energi yang ditunjang dengan penyediaan listrik	67,00 persen
		Kapasitas ketersediaan jaringan irigasi	74.234 Ha
		Jumlah pengamanan dalam pengendalian banjir dan pengamanan pantai	1.500 brojong, 20.000 karung plastik berisi pasir

7	Menguatnya Ekonomi Wilayah dan Meningkatkan Produksi Berbasis Masyarakat	Supporting pertumbuhan agroindustri yang berbasis sumberdaya lokal	4 kab/kota
		Jumlah pengembangan lembaga ekonomi	226 BUMDES
		Jumlah kelompok tani yang menjalankan usaha agrobisnis pedesaan	10 kelompok tani
		Jumlah kerjasama antar kawasan andalan	1 MoU
8	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Gerakan Sulsel Hijau	Persentase pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	20 persen
		Persentase pengembangan kapasitas dalam pengelolaan lingkungan hidup	20 persen
		Fasilitasi pembangunan perhutanan sosial dalam peningkatan kualitas pengelolaan hutan berbasis pemberdayaan masyarakat	4.000 Ha
		Rehabilitas lahan kritis dalam peningkatan kualitas pengelolaan huan	469.885 Ha
		Persentase peningkatan kapasitas perlindungan dan pengamanan hutan dan konsevasi SDA	20 persen
		Pemeliharaan batas kawasan hutan	300 km
		Pengendalian kebakaran kerusakan hutan dan lahan	360,78 Ha
		Koordinasi peningkatan kualitas pengelolaan B3 dan limbah B3	9 kab/kota

Catatan : Pernyataan dan lampiran Penetapan Kinerja Tahun 2014 terlampir

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam Proses pengukuran capaian kinerja Sasaran Strategis Tahun 2014 ini, dijumpai berbagai permasalahan dan hambatan, seperti masih adanya target kinerja dan realisasi yang secara kuantitatif tidak dapat diukur, serta adanya perubahan/revisi Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) melalui Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 48 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 yang merevisi RKPD menjadi 6 (enam) Sasaran Strategis Pembangunan yaitu 1). Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan, 2). Peningkatan Produksi dan Pemasaran Hasil Pertanian, 3) Peningkatan Industri Pengolahan dan Pariwisata Unggulan, 4). Perluasan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, 5). Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Lingkungan Hidup, dan 6) Pembinaan serta Pengembangan Koperasi dan UMKM.

Dari 8 (delapan) Sasaran strategis yang telah ada, di dalamnya sudah memuat 6 (enam) sasaran dalam RKPD Perubahan dan dapat dianalisis serta dirumuskan secara optimal. Dengan demikian diharapkan apa yang termuat dalam laporan ini setidaknya telah dapat dijadikan sebagai gambaran secara umum tentang capaian kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2014.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator sasaran strategis pada Penetapan Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 dengan realisasinya serta membandingkan capaian kinerja Tahun-Tahun sebelumnya, sebagai berikut :

Tabel III-1

SASARAN STRATEGIS 1
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kebutuhan Dasar

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Angka Harapan Hidup	71,3 Tahun	70,6 Tahun	99,02 %
2	Angka Kematian Ibu (AKI)	50 - 55 per 100.000 kelahiran hidup	138 Kasus	73,19 %
3	Persentase Cakupan Air Bersih	85 % RT di Perdesaan	50,69 %	59,63 %
4	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	8,00 Tahun	7,99 Tahun	99,98 %
5	Persentase Kelulusan dalam Ujian Nasional	100 %	99,81 %	99,81 %
6	Prevalensi Gizi Kurang pada Anak Balita	13 %	19 %	68,42 %
7	Prevalensi Gizi Buruk	4 %	6,6 %	60,61 %
8	Angka Melek Huruf	90,14 %	90,04 %	98,89 %
9	Persentase Layanan Air Bersih di perkotaan	90 % RT	75,46%	83,84 %
10	Persentase Perbaikan lingkungan/ perumahan Sehat serta Sanitasi	85 %	85 %	100 %
11	Persentase perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	56 % pada RT	49,97 % pd RT	89,23 %

Berdasarkan pengukuran pencapaian Sasaran Strategis 1 yaitu “ **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kebutuhan Dasar** “ secara umum capaian kinerja dari 11 (sebelas) indikator kinerja belum sesuai dengan target yang ditetapkan, capaian kinerja Sasaran Strategis 1 sebesar **84,78 %** atau tercapai dengan kualifikasi **Baik**. Sasaran Strategis 1 ini didukung oleh 3 (tiga) SKPD yakni Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Dinas Tata Ruang dan Permukiman.

Kondisi tersebut di atas secara umum disebabkan antara lain oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Jangkauan pelayanan kesehatan terutama pada daerah-daerah terpencil masih terbatas karena sarana transportasi belum memadai.
2. Tingkat pengetahuan dan inisiatif masyarakat dalam berperilaku bersih dan sehat masih rendah.
3. Distribusi tenaga kesehatan belum proporsional terutama tenaga strategis dan fungsional terlatih serta adanya tugas rangkap bagi petugas di tingkat Puskesmas.
4. Faktor yang mempengaruhi belum tercapainya target Angka Rata-rata Lama Sekolah antara lain kurangnya akses usia sekolah mendapatkan pendidikan terutama di daerah terpencil, terpencar dan terluar, Kurangnya kesadaran orang tua yang menilai pendidikan tidak dapat memberi kontribusi yang menunjang kehidupan dalam waktu dekat, sehingga lebih memanfaatkan tenaga anak untuk membantu mencari nafkah.
5. Belum tercapainya target Tingkat Kelulusan dalam Ujian Nasional (UN) antara lain disebabkan oleh pengelolaan cetakan naskah UN secara terpusat yang tidak terkoordinir secara baik, faktor tingkat kesukaran soal UN yang mengalami peningkatan untuk 3 tingkatan pendidikan (SMP/MTs, SMA/MA dan SMK), hal ini sangat menyulitkan peserta didik karena Standar Kompetensi Kelulusan tidak dimatangkan atau dipersiapkan lebih mantap dan lebih awal oleh para pendidik dalam prose pembelajaran.
6. Angka Melek Huruf (AMH) Tahun 2014 mencapai 90,04 % dari yang ditargetkan 90,14 % hal ini disebabkan karena masih ada masyarakat penyandang buta aksara sudah terlalu tua sehingga kemampuan menyerap ilmu lebih lambat, belum lagi yang menderita gangguan penglihatan karena usia tua, belum sinkronnya persepsi dalam menetapkan komponen variabel dalam menghitung AMH seperti usia lanjut 60 Tahun ke atas masih dimasukkan komponen perhitungan walaupun di sisi lain ada yang membatasi hanya usia produktif saja yaitu 15 – 60 Tahun.
7. Kesulitan mendapatkan air bersih disebabkan terbatasnya akses dan penguasaan sumber air.

8. Menurunnya mutu sumber air yang disebabkan oleh kerusakan daerah hulu sungai juga akibat pencemaran air.
9. Kecenderungan masyarakat untuk memanfaatkan air sungai dan sumur galian yang tercemar untuk berbagai keperluan.

Hingga Tahun 2012 Angka Harapan Hidup masyarakat di Sulawesi Selatan telah mencapai 70,45 Tahun yang berarti sedikit lebih tinggi dari Angka Harapan Hidup rata-rata Nasional yang mencapai 69,9 Tahun. Pada Tahun 2013, Angka Harapan Hidup Sulawesi Selatan sekitar 70,60 Tahun sementara Angka Harapan Hidup Nasional berkisar 70,1 Tahun. Apabila indikator tersebut dicermati dari Tahun ke Tahun, maka angka harapan hidup di Sulawesi Selatan setiap Tahun mengalami peningkatan. Angka Harapan Hidup juga sangat dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas kesehatan yang semakin lengkap dan terjangkau, serta kemampuan pribadi rata-rata penduduk untuk mengakses layanan kesehatan yang tersedia.

Angka Kematian Ibu (AKI), berdasarkan data AKI pada Tahun 2012 sebanyak 140 kasus yang kemudian mengalami penurunan menjadi 108 kasus pada Tahun 2013, akan tetapi kembali terjadi peningkatan pada Tahun 2014 yaitu 138 kasus setiap 100.000 kelahiran hidup.

Upaya perbaikan kualitas kesehatan di Sulawesi Selatan tidak hanya dilakukan melalui penyediaan fasilitas maupun tenaga kesehatan namun diupayakan pula melalui perbaikan gizi masyarakat, dan indikator yang berkaitan dengan hal tersebut adalah Prevalensi Gizi Buruk dan Prevalensi Gizi Kurang pada anak balita.

Berdasarkan publikasi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan tentang prevalensi gizi kurang pada anak balita, menunjukkan prevalensi gizi kurang di Sulawesi Selatan masih sedikit berfluktuasi, yakni dari 18 % pada Tahun 2012, dan pada Tahun 2013 prevalensi gizi kurang pada anak balita mengalami penurunan menjadi 19 % dan pada Tahun 2014 dengan target 13 % terealisasi 19 % dengan tingkat capaian hanya sebesar 68,42 persen.

Prevalensi gizi buruk di Sulawesi Selatan telah mengalami penurunan yakni pada Tahun 2012 sebesar 6,4 %, Tahun 2013 prevalensi gizi buruk berada pada

angka 6,6 % dan pada Tahun 2014 prevalensi gizi buruk sebesar 6,6 % dari target 4 % dengan capaian kinerja 60,61 %. Namun demikian, walaupun telah terjadi perbaikan kemungkinan besarnya nilai indikator tersebut masih akan lebih besar mengingat kasus gizi buruk maupun gizi kurang masih cukup banyak dibanding yang terdata, mengingat sistem pendataan yang dilakukan masih mengandalkan hasil laporan masyarakat.

Berkaitan dengan peningkatan cakupan air bersih di pedesaan, khusus dalam beberapa Tahun terakhir telah mengalami peningkatan, dimana pada Tahun 2012 sebesar 42,67 %, pada Tahun 2013 cakupan air bersih terlayani mencapai 49,78 % dan pada Tahun 2014 sebesar 50,69 %.

Demikian pula cakupan air bersih di daerah perkotaan dalam beberapa Tahun terakhir juga telah mengalami peningkatan, dimana pada Tahun 2012 cakupan air bersih di daerah perkotaan mencapai 60,55 % telah dapat ditingkatkan menjadi 70,84 % pada Tahun 2013 demikian pula halnya pada Tahun 2014 meningkat menjadi 75,47 %. Walaupun demikian target 90 persen RT cakupan air bersih perkotaan pada Tahun 2014 belum dapat tercapai mengingat kapasitas sumber air bersih yang tersedia belum memungkinkan untuk memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat pada seluruh perkotaan yang ada. Untuk itu sangat dibutuhkan adanya sinergitas kegiatan pembangunan khususnya dalam hal pemenuhan dan pemeliharaan air baku sebagai sumber air minum.

Berkaitan layanan perbaikan lingkungan/perumahan sehat serta sanitasi telah mengalami peningkatan dari Tahun ke Tahun, dimana pada Tahun 2012 mencapai 80,55 %. pada Tahun 2013 meningkat menjadi 85 % demikian pula untuk Tahun 2014, sehingga apa yang ditargetkan dapat tercapai 100 %.

Khusus untuk perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) pada rumah tangga adalah upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar tahu, mau dan mampu melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat, dimana pada Tahun 2014 hanya dapat terealisasi sebesar 49,97 % pada rumah tangga dari target 56 % pada RT dengan capaian kinerja 89,23 %.

Dalam pembangunan bidang pendidikan, maka untuk mengukur dimensi pengetahuan penduduk di Sulawesi Selatan digunakan 2 (dua) indikator utama yakni Angka Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Melek Huruf, disamping beberapa indikator penunjang lainnya yang secara keseluruhan tergambar pada kinerja sasaran pembangunan ini.

Rata-rata lama sekolah merupakan rata-rata jumlah Tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 Tahun ke atas di seluruh jenjang pendidikan formal yang diikuti, sementara Angka Melek Huruf adalah persentase penduduk usia 15 Tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Rata-Rata Lama Sekolah penduduk Sulawesi Selatan pada Tahun 2014 untuk angka statistik Tahun 2013 Tahun yakni 7,99 Tahun dengan capaian kinerja 99,98 %, sedikit dibawah dari rata-rata nasional yang mencapai 8,14 Tahun. Walaupun demikian, apabila indikator tersebut dicermati maka penduduk Sulawesi Selatan maupun rata-rata nasional hanya sampai pada jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) kelas 1. Hal ini menggambarkan pula bahwa penduduk daerah ini yang berusia 15 Tahun ke atas, putus sekolah setelah menamatkan pendidikan Sekolah Dasar. Selama kurun waktu lima Tahun terakhir, rata-rata lama sekolah menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat walaupun pergerakannya agak sedikit melambat tiga Tahun terakhir ini. Pencanaan kebijakan pemerintah yang membebaskan biaya sekolah atau yang dikenal dengan Pendidikan Gratis mulai memberikan dampak terhadap perbaikan rata-rata lama bersekolah.

Tidak jauh berbeda dengan rata-rata lama sekolah nasional, selisih Angka Melek Huruf penduduk Sulawesi Selatan jika dibanding rata-rata nasional masih menunjukkan kesenjangan, dimana pada Tahun 2014 untuk angka statistik Tahun 2013 angka melek huruf penduduk Sulawesi Selatan mencapai 90,04 % dibawah target RKPD sebesar 90,14 % dengan capaian kinerja 98,89 persen, sementara rata-rata nasional sebesar 94,14 %. Dalam kurun waktu dua Tahun terakhir yakni pada Tahun 2012 indikator pendidikan tersebut telah mencapai 88,39 % dan Tahun 2013 menjadi 88,50 %.

Walaupun kinerja kedua indikator tersebut belum sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD, apa yang telah dicapai telah mampu

mendorong peningkatan kualitas pendidikan di daerah ini, dan hal ini dapat dilihat pada Persentase Kelulusan Siswa dalam Ujian Nasional (UN).

Pada jenjang Sekolah Dasar (SD), tingkat kelulusan siswa pada ujian pada Tahun 2012 sebesar 99,99 %. Pada jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) mengalami pula peningkatan dari 99,64 % pada Tahun 2012. Khusus tingkat kelulusan pada jenjang SMK sebesar 99,78 % pada Tahun 2012, pada Tahun 2014 semua tingkat dalam jenjang pendidikan untuk kelulusan dalam ujian nasional dapat mencapai angka 99,81 % telah mendekati target 100 % dalam RKPD dengan capaian kinerja 99,81 %. Tingkat kelulusan tersebut didukung oleh capaian nilai rata-rata siswa dalam ujian nasional, dimana indikator ini merupakan nilai rata-rata Ujian Nasional perolehan siswa yang dinyatakan lulus dibagi dengan nilai perolehan siswa per mata pelajaran yang diujikan.

Kebijakan paling menonjol yang telah diterapkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di daerah ini adalah pendidikan gratis dengan sasaran tersedianya fasilitas dan meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah (SD dan setara SLTP) dan yang sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah bagi sebagian besar anak usia sekolah (6-15 Tahun). Dalam pelaksanaannya, pembiayaan kebijakan ini ditanggung bersama antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan sharing 40 % Pemerintah Provinsi dan 60 % Pemerintah Kabupaten/Kota.

Walaupun capaian kinerja untuk Tahun 2014 belum mampu dicapai sesuai target, akan tetapi untuk tingkat capaian 2 (dua) Tahun terakhir yaitu Tahun 2012 dan 2013 cenderung meningkat pencapaiannya sebagaimana terlihat dalam **Tabel III-2** berikut ini.

Tabel III-2

Realisasi Capaian Sasaran Strategis 1 Tahun 2012 - 2014

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian Tahun 2012 - 2014		
			2012	2013	2014
1	Angka Harapan Hidup	Thn	70,45	70,60	70,60
2	Angka Kematian Ibu (AKI)	Kasus	140	108	138

3	Persentase Cakupan Air Bersih	%	42,67	49,78	50,69
4	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Thn	7,95	7,97	7,99
5	Persentase Kelulusan dalam Ujian Nasional	%	99,59	99,70	99,81
6	Prevalensi Gizi Kurang pada Anak Balita	%	18	19	19
7	Prevalensi Gizi Buruk	%	6,4	6,6	6,6
8	Angka Melek Huruf	%	88,39	88,50	90,04
9	Persentase Layanan Air Bersih di perkotaan	%	60,55	70,84	75,46
10	Persentase Perbaikan lingkungan/perumahan Sehat serta Sanitasi	%	80,55	85	85
11	Persentase perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	%	49,3	55,1	49,97

Terhadap capaian target Tahun 2014 jika dibandingkan dengan target yang direncanakan sampai Tahun akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu Tahun 2018 pada umumnya capaian untuk sasaran strategis ini bukan merupakan capaian akumulasi sehingga tidak dapat dibandingkan secara langsung. Antara lain untuk indikator kinerja Angka Harapan Hidup, dari target akhir RPJMD yaitu 73,10 Tahun, jika dibandingkan dengan pencapaian Tahun 2014 yaitu 70,6 Tahun sudah menghampiri dari target yang akan dicapai tersebut. Selanjutnya untuk indikator kinerja Angka Rata-Rata Lama Sekolah dari target akhir RPJMD sebesar 8,12 Tahun, dibandingkan dengan pencapaian Tahun 2014 sebesar 7,99 juga sudah menghampiri target yang akan dicapai.

Usulan pemecahan masalah yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis 1 adalah :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi serta meningkatkan pelayanan berbasis khusus untuk daerah-daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan.
2. Keterlibatan lintas sektoral terkait pembangunan kesehatan.

3. Mendayagunakan tenaga secara profesional dan proporsional serta advokasi ke Pemerintah Kabupaten/Kota terkait tenaga kesehatan yang telah dialihfungsikan.
4. Mendorong Kabupaten/Kota agar menjadikan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sebagai program prioritas.
5. Mendorong dan memfasilitasi satuan pendidikan terutama kepada pendidik yang mengajar di kelas terakhir untuk lebih banyak melakukan program pendalaman materi, try out, pengayaan dan program remedial, lebih fokus menyusun materi pembelajaran sesuai Standar Kompetensi Kelulusan.
6. Peningkatan koordinasi baik oleh Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota terkait penyelenggaraan pengembangan infrastruktur perumahan/permukiman.

Upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian target Sasaran Strategis 1, melalui beberapa program antara lain :

1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 692.100.000,-
2. Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.880.328.116,-
3. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Balita dan Lansia dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 476.200.000,-
4. Program Perbaikan Gizi Masyarakat dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 449,730.000,-
5. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.703.725.000,-
6. Program Wajib Belajar 12 Tahun dengan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.506.500.000,-
7. Program Pembentukan Daya Saing dan Karakter Bangsa dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.304.582.000,-
8. Program Intensifikasi dan Perluasan Akses Pendidikan keaksaraan fungsional dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 5.574.006.800,-
9. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 11.991.520.000,-

Tabel III-3

SASARAN STRATEGIS 2
Meningkatnya Mutu dan Produktivitas Hasil Pertanian

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah Surplus Beras (Over Stock)	2,2 - 2,3 juta ton	2.245.101 ton	100 %
2	Jumlah Produksi Jagung	1,5 - 1,6 juta ton	1.498.253 ton	99,89 %
3	Jumlah Populasi Ternak Sapi	1,45-,55 juta ekor	1,26 juta ekor	86,89, %
4	Jumlah Produksi Udang Segar	33.200-33.300 ton	43.865 ton	130 %
5	Persentase ekstensifikasi dan diversifikasi pada areal pengelolaan lahan pertanian (jaringan irigasi)	83 persen	83 persen	100%
6	Jumlah Produksi Coklat	216.602 ton	137.860 ton	63,65 %
7	Jumlah Produksi Ruput Laut	Di atas 2 juta ton	2.744.650 ton	115,5 %
8	Penyediaan alat dan mesin pertanian dalam pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana produksi pertanian	236.034 unit	229.303 unit	99,89 %
9	Luas kerusakan hutan turun hingga	276.900 Ha dari luas Hutan 2.725.796 Ha	276.284 Ha dr luas Hutan 2.725.796 Ha	99,78 %

Berdasarkan pengukuran pencapaian sasaran strategis 2 yaitu “ **Meningkatnya Mutu dan Produktivitas Hasil Pertanian** “ dengan 9 (sembilan) indikator kinerja rata-rata belum dapat dicapai sesuai target yang ditetapkan, meskipun terdapat 2 (dua) indikator yang melampaui target yaitu Jumlah Produksi Udang Segar yang mencapai 130 % dan Jumlah Produksi Rumput Laut yang mencapai 115,5 %. Capaian kinerja Sasaran Strategis 2 sebesar **99,51 %** atau tercapai dengan kualifikasi **Sangat Baik**. Sasaran Strategis 2 ini didukung oleh 5

(lima) SKPD yakni Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Kehutanan.

Kondisi tersebut di atas secara umum disebabkan antara lain sebagai berikut :

1. Jumlah surplus beras Tahun 2014 sebesar 2,25 juta ton telah memenuhi target sebesar 100%, pencapaian surplus beras ini sangat dipengaruhi oleh perubahan iklim yang terjadi dan penyediaan sarana produksi pertanian yang harus tepat waktu.
2. Jumlah produksi jagung tidak tercapai sesuai target disebabkan adanya persaingan komoditas di lapangan dimana lahan yang biasa ditanami jagung seperti lahan sawah dan lahan kering sebagian juga ditanami komoditas padi dan palawija lain seperti kedelei, kacang tanah, kacang hijau, ubi jalar dan komoditas hortikultura seperti cabe, dan bawang merah dimana komoditas ini pada umumnya meningkat produksinya di Tahun 2014.
3. Jumlah populasi ternak sapi tidak mencapai target disebabkan beberapa hal yaitu adanya peningkatan permintaan ternak sapi potong keluar provinsi, tingginya tingkat pemotongan sapi betina produktif, adanya peningkatan pengeluaran ternak yang dipicu oleh meningkatnya permintaan ternak sapi dari provinsi lain khususnya wilayah timur Indonesia, harga ternak sapi yang cenderung naik dan meningkatnya kebutuhan ekonomi peternak.
4. Jumlah Produksi Udang Segar dan Rumput Laut Tahun 2014 dapat melebihi target yang telah ditetapkan, akan tetapi dalam pencapaian tersebut dijumpai beberapa hambatan yaitu, infrastruktur produksi yang belum memadai seperti saluran dan jaringan irigasi yang kurang optimal serta pemanfaatan lahan budidaya yang belum dilakukan secara optimal, keterbatasan sarana dan prasarana produksi perikanan, lemahnya kelembagaan dan daya saing produk perikanan serta pemanfaatan tata ruang laut dan pesisir yang belum optimal.
5. Masih rendahnya komoditas produksi coklat (kakao) disebabkan anomali iklim/cuaca, serangan OPT utamanya hama Penggerek Buah Kakao (PBK) dan Busuk Buah, adanya petani kakao yang belum tersentuh program gernas di

Kabupaten Luwu Utara, Luwu Timur dan Pinrang yang beralih ke kelapa sawit dan pencetakan sawah baru,

6. Penyediaan alat dan mesin pertanian dalam pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana produksi pertanian didukung oleh anggaran APBD dan APBN akan tetapi untuk Tahun 2014 ini terjadi pemotongan/blokir anggaran sehingga target tidak tercapai.
7. Masih terbatasnya tenaga pengamanan hutan/polisi kehutanan yang ada di daerah dibanding dengan luas kawasan hutan yang ada sehingga kasus ilegal logging dan penyerobotan kawasan belun dapat teratasi.

Untuk mendorong peningkatan peran sektor pertanian dalam pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan serta guna meningkatkan kualitas ketahanan pangan daerah, maka telah ditetapkan beberapa komoditas yang menjadi unggulan seperti Beras, Jagung, Coklat (Kakao), Populasi Sapi, Udang dan Rumput laut.

Sebagai daerah penyangga beras nasional dan memperhatikan peningkatan produksi beras dalam beberapa Tahun terakhir, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan meningkatkan target produksi beras yang dalam RPJMD 2013-2018 ditetapkan 2 juta ton menjadi 3 juta ton pada Tahun 2013. Apa yang dicanangkan tersebut telah mendorong para pelaku pembangunan pada komoditas ini bekerja keras, dan dampak dari upaya tersebut terlihat dari peningkatan produksi beras yang pada Tahun 2012 produksi beras yang dicapai lebih meningkat lagi dan telah mencapai 3,16 juta ton (LKPJ Gub 2012), dan pada Tahun 2014 surplus beras (over stock) mencapai 2,25 juta ton dari target 2,2 – 2,3 juta ton dengan capaian kinerja 100 %. Dengan melihat angka capaian tersebut, maka target produksi beras 2,2 juta ton pada Tahun 2014 telah dapat terlampaui. Berkaitan dengan pencapaian produksi beras tersebut Gubernur Sulawesi Selatan mendapat penghargaan “Peningkatan Produksi Beras di atas 5 % dalam mendukung program Peningkatan Produksi Beras Nasional ” oleh Presiden RI. Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan Nasional yang secara kuantitas produksi berada pada peringkat 4 secara nasional yang pada Tahun 2014 Pencapaian produksi Beras mengalami peningkatan dari 3,182,645 ton Tahun 2013 menjadi 3.436,836 ton Tahun 2014 dengan surplus mencapai 2.245.101 ton dan overstock mencapai 2.496.083 ton.

Berkaitan dengan produksi jagung, yang apabila perkembangannya diperhatikan dalam beberapa Tahun terakhir ini menunjukkan peningkatan, hal ini terlihat pada produksi yang dicapai pada Tahun 2012 sebesar 1,52 juta ton. Pencapaian produksi inipun telah mendekati target produksi 1,57 juta ton pada Tahun 2013. Pada Tahun 2014 produksi jagung dengan target 1,5 juta ton dapat dicapai sebesar 1.498.253 ton dengan capaian kinerja 99,89 %. Pencapaian ini secara kuantitas mengalami peningkatan namun pencapaian belum mencapai dari target yang telah ditentukan dalam RKPD sebesar 1,6 juta ton oleh karena terjadi peningkatan luas tanam dan luas panen pada padi dan banyak petani yang beralih menanam palawija sedangkan lahan yang biasa ditanami adalah lahan sawah dan lahan kering.

Berkaitan dengan Sapi sebagai komoditas unggulan sub sektor peternakan memberikan gambaran bahwa, populasi sapi di Sulawesi Selatan hingga Tahun 2012 telah mencapai 1,11 juta ekor dan pada Tahun 2014 populasi sapi meningkat sebesar 1,26 juta ekor dimana targetnya 1,45 – 1,55 juta ekor dengan capaian kinerja 86,89 %. Sektor yang menunjukkan pencapaian yang sangat memuaskan adalah pengembangan disektor peternakan sehingga Sulawesi Selatan sejak Tahun 2013 telah mencapai swasembada daging yang telah mencukupi kebutuhan akan stock daging. Peningkatan Produksi Sapi di Sulawesi Selatan dapat terlihat dari perkembangan setiap Tahunnya, pada Tahun 2013 pencapaian produksi sapi hanya sebesar 1.152.053 ekor dan Tahun 2014 telah mencapai 1.258.902 ekor.

Komoditas unggulan sub sektor perikanan yakni udang segar dan rumput laut, juga memperlihatkan peningkatan. Khusus produksi udang dalam beberapa Tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang sangat besar yakni dari 28,14 ribu ton pada Tahun 2012 atau rata-rata tumbuh sebesar 12,75 %, dan pada Tahun 2013 produksi udang segar mencapai 31,55 ribu ton. Dengan memperhatikan apa yang telah dicapai dalam beberapa Tahun sebelumnya maka pencapaian target 43,865 ton produksi udang pada Tahun 2014 telah melampaui target 33.200 – 33.300 ton dengan capaian kinerja 130 persen. Di bidang perikanan komoditas udang dalam perkembangannya menunjukkan respon yang positif ini ditandai dengan peningkatan produksi udang setiap Tahun dan pada Tahun 2014 mengalami peningkatan produksi sebesar 27,4 % dari 34.420,7 ton pada Tahun

2013 menjadi 43.865 ton, ini menggambarkan bahwa pencapaian produksi Udang dari target dalam RKPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 sebesar 34.420 ton telah terlampaui.

Sementara itu, produksi rumput laut yang ditargetkan dapat mencapai 1 juta ton pada Tahun 2013 nampaknya telah terlampaui, hal ini terlihat pada produksi rumput laut yang pada Tahun 2012 telah mencapai 2,10 juta ton, pencapaian produksi rumput laut tersebut menunjukkan suatu peningkatan yang cukup besar yakni pada Tahun 2014 produksi rumput laut di Sulawesi Selatan mencapai 2,74 juta ton di atas target 2 juta ton dengan capaian kinerja 115,5 %. Berkaitan dengan pencapaian produksi rumput laut tersebut, maka sejak Tahun 2009 hingga Tahun 2014 Provinsi Sulawesi Selatan menempati peringkat pertama tingkat Nasional dalam produksi komoditi unggulan Rumput Laut. Pencapaian produksi rumput laut di Tahun 2014 ini tentunya sangat membanggakan oleh karena selain pencapaian produksi yang mengalami peningkatan dari Tahun sebelumnya juga yang tidak kalah membanggakannya adalah bahwa pencapaian produksi ini telah melampaui dari target yang telah ditetapkan dalam RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 sebesar 2,5 juta ton.

Khusus produksi Coklat (kakao) sebagai komoditas unggulan sub sektor perkebunan hingga Tahun 2012 telah mencapai 175,81 ribu ton. Masih rendahnya produksi komoditas ini akibat dilakukannya peremajaan tanaman coklat (kakao) di Sulawesis Selatan. Walaupun target produksi yakni 216.602 ton pada Tahun 2014 belum tercapai, namun Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tetap optimis akan pencapaian target produksi 137.860 ton dengan capaian kinerja 63,65 %. Dari sektor perkebunan Potensi Unggulan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan terdiri atas Kakao, Kelapa sawit, Kelapa, Kopi, Jambu mente, lada, cengkeh, Tebu, Pala dan tembakau namun yang merupakan priorotas utama adalah kakao.

Untuk Sasaran Strategis 2 belum mencapai target sebagaimana diharapkan, akan tetapi tingkat capaian Tahun 2014 lebih meningkat dibanding capaian Tahun-Tahun sebelumnya, hal tersebut terlihat dalam **Tabel III-4** di bawah.

Tabel III-4
Realisasi Capaian Sasaran Strategis 2 Tahun 2012 - 2014

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian Tahun 2012 - 2014		
			2012	2013	2014
1	Jumlah Surplus Beras (Over Stock)	Ton	2.112.936	2.152.460	2.245.101
2	Jumlah Produksi Jagung	Ton	1.515.330	1.250.203	1.498.253
3	Jumlah Populasi Ternak Sapi	Ekor	1,11 juta	1,12 juta	1,26 juta
4	Jumlah Produksi Udang Segar	Ton	28.145,6	34,420,7	43.865
5	Persentase ekstensifikasi & diversifikasi pd areal pengelolaan lahan pertanian (jaringan irigasi)	%	83	83	83
6	Jumlah Produksi Coklat	Ton	175.813	179.170.	137.860
7	Jumlah Produksi Ruput Laut	Ton	2.104.446	2.422.154	2.744.650
8	Penyediaan alat dan mesin pertanian dalam pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana produksi pertanian	Unit	229.159	218.374	229.303
9	Luas kerusakan hutan turun hingga	Ha	346.720	307.196	276.284

Terhadap capaian target Tahun 2014 jika dibandingkan dengan target yang diinginkan sampai Tahun akhir periode RPJMD yaitu Tahun 2018 pada umumnya capaian tersebut telah sesuai dengan yang diharapkan, misalnya untuk indikator kinerja Jumlah Produksi Udang Segar, dari target Tahun 2018 yaitu 35.000 ton pencapaian Tahun 2014 mencapai sebesar 43.865 ton sudah melebihi target Tahunan bahkan melebihi target akhir periode RPJMD. Pencapaian Tahun 2014 ini telah mencapai 125 % dari target yang diinginkan pada akhir periode RPJMD. Begitu juga untuk indikator kinerja Jumlah Produksi Rumput Laut, dari target target akhir periode RPJMD yaitu 3.000.000 ton, pencapaian Tahun 2014 sebesar 2.744.650 ton jika dibandingkan dengan kondisi kinerja yang diinginkan

telah mencapai kondisi 91,5 %. Sedangkan untuk indikator kinerja luas kerusakan hutan, pencapaian Tahun 2014 adalah kerusakan hutan turun sebesar 276.284 Ha dari luas hutan 2.725.796 Ha apabila dibandingkan dengan target yang diinginkan pada akhir periode RPJMD yaitu turun hingga 176.580,56 Ha dari luas hutan 2.725.796 Ha telah mencapai kondisi 63,91 % dari target yang ingin dicapai.

Usulan pemecahan masalah yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis 2 adalah :

1. Jika terjadi perubahan iklim maka perlu dilakukan antisipasi percepatan tanam atau varietas umur pendek jika curah hujan/pengairan tidak cukup dan perlu dilakukan antisipasi secepatnya penanaman kembali dengan benih cadangan nasional jika terjadi banjir yang menyebabkan puso.
2. Perlunya meningkatkan anggaran bantuan subsidi benih unggul untuk jagung dan perluasan areal tanam di daerah yang ada sumber airnya sehingga peningkatan intensitas pertanaman bisa dilakukan khususnya untuk tanaman jagung.
3. Perlu untuk segera mengesahkan dan menerbitkan Peraturan Daerah tentang larangan pemotongan sapi betina produktif, pemberian insentif bagi peternak yang memiliki sapi betina bunting dan tidak dipotong, dan pemberlakuan pengeluaran ternak sesuai kuota yang telah ditetapkan melalui karantina dan perbatasan lintas provinsi.
4. Guna memacu peningkatan produksi udang segar dan rumput laut, perlu meningkatkan pembangunan infrastruktur produksi seperti rehabilitasi saluran dan jaringan irigasi sehingga pemanfaatan lahan usaha perikanan dapat berkembang secara optimal, berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana produksi perikanan, mendorong peningkatan kelembagaan bidang perikanan sehingga industri perikanan tidak didominasi oleh usaha skala mikro, kecil dan menengah yang memungkinkan produk perikanan tidak lagi didominasi oleh produk bahan baku mentah sehingga hasil yang dipasarkan sudah dalam bentuk primer, perlu dilakukan penataan tata ruang dan pesisir yang jelas sehingga tidak merugikan pembudidaya di wilayah pesisir dan pengelolaan serta pemanfaatan pulau-pulau kecil dapat berjalan dengan optimal.

5. Untuk meningkatkan produksi coklat (kakao) sebagaimana target yang telah ditetapkan, diharapkan serangan hama PBK dapat diatasi secara optimal.
6. Mengusulkan alokasi anggaran alat dan mesin pertanian yang tidak terealisasi pada Tahun sebelumnya agar dianggarkan pada Tahun berikutnya sehingga target yang ada dapat dicapai.
7. Penambahan tenaga pengamanan hutan/polisi kehutanan yang ada di daerah melalui perekrutan PNS formasi Polisi Hutan sehingga kawasan hutan yang ada dapat terjaga secara optimal untuk meminimalisir kerusakan hutan.

Upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian target Sasaran Strategis ini melalui program sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 40.286.794.000,-
2. Produksi Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan (APBN) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 151.050.040.000,-
3. Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 42.460.885.400,-
4. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian (APBN) dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 202.688.440.000,-
5. Program Pengelolaan Hasil, Pasca Panen Pengembangan Agribisnis dan Penyebaran Informasi dengan jumlah anggaran sebesar Rp.10.465.000.000,-
6. Program Pembinaan Pengembangan Bibit Komoditi Unggulan Perkebunan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 18.682.237.500,-
7. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 6.879.810.480,-
8. Program Pengembangan Perikanan Budi Daya dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 23.130.150.400,-

Tabel III-5

SASARAN STRATEGIS 3
Terdorongnya Industri Pengolahan Berbasis Sumber Daya Lokal

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah Investasi (ADHB)	55-60 trilyun Rp	7.951.701.120.000	113,59%
2	Nilai PDRB (ADHB)	210 trilyun Rp	300,1 trilyun Rp.	142,9%
3	Jumlah pendapatan perkapita (ADHB)	23- 24 juta Rp	35,59 juta Rp.	148,29%
4	Indeks paritas Daya Beli	649.400 rupiah mencapai indeks 66,9 persen	5 persen	100 %
5	Persentase pertumbuhan Ekonomi	7,8 - 8 persen	7,57 persen	94,63%
6	Peningkatan pertumbuhan industri pengolahan	2 - 4 persen	2 persen	100 %
7	Peningkatan nilai ekspor perdagangan	1,68 milyar USD	1,65 milyar USD	98,21%
8	Persentase pertumbuhan sektor pertanian	5,51 persen	5,51 persen	100 %
9	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	115.000 kunjungan	115.763 kunjungan	132 %
10	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	5.250.000 kunjungan	5.920.528 kunjungan	113 %
11	Jumlah obyek yang telah difasilitasi untuk menjadi destinasi pengembangan obyek wisata unggulan Sulsel	4 obyek	8 obyek	200 %

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian pada **sasaran strategis 3** yaitu “ **Terdorongnya Industri Pengolahan Berbasis Sumber Daya Lokal** ” dengan 11 (sebelas) indikator kinerja, terdapat 4 (empat) indikator kinerja yang

melebihi target yaitu Jumlah Pendapatan Perkapita sebesar 148,29 %, Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara mencapai 132 %, Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara mencapai 113 % dan Jumlah obyek wisata yang difasilitasi untuk menjadi destinasi pengembangan obyek wisata unggulan Sulsel dari 4 obyek yang ditargetkan ternyata dapat dicapai 8 obyek sehingga capaian kinerja sebesar 200 %. Capaian kinerja Sasaran Strategis 3 **sebesar 122,05 %** atau tercapai dengan kualifikasi **Sangat Baik**. Sasaran Strategis 3 ini didukung oleh 5 (lima) SKPD yakni Bappeda, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, dan Biro Bina Perekonomian.

Khusus indikator kinerja Jumlah Investasi (ADHB) telah terjadi perubahan atas target sebagaimana tertuang dalam Revisi RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 yang semula sebesar 55-66 Trilyun Rupiah menjadi 7 Trilyun Rupiah, dengan realisasi sebesar Rp.7.951.701.120.000,-dengan tingkat capaian 113,59%. Demikian halnya dengan Indikator Kinerja Indeks Paritas Daya Beli terjadi perubahan target dari semula 66,9 % menjadi 5 % dengan realisasi sebesar 5 % dengan tingkat capaian 100 %.

Kondisi tersebut di atas secara umum disebabkan antara lain sebagai berikut :

1. Melambatnya pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2014 bersumber dari penurunan produksi kategori pertanian, konstruksi, perdagangan dan penyediaan akomodasi, lambatnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan lembaga nirlaba yang disebabkan kenaikan harga setelah penyesuaian harga BBM.
2. Masih rendahnya nilai tambah produksi sektor pertanian merupakan penyebab utama rendahnya peranan sektor ini pada pertumbuhan ekonomi daerah, tentu hal ini diakibatkan oleh orientasi pembangunan sektor pertanian yang masih pada aspek peningkatan produksi.
3. Terjadi peningkatan dalam pengolahan pangan utamanya dari sumber daya lokal yang berpotensi dapat dikembangkan.

4. Belum optimalnya potensi destinasi dan daya tarik wisata pada berbagai daerah yang memiliki keunikan sumber daya alam dan kebudayaan daerah
5. Persaingan daerah tujuan wisata semakin tajam seiring dengan tumbuh pesatnya destinasi lain (dalam dan luar negeri)
6. Belum maksimalnya pelaksanaan promosi yang memanfaatkan media informasi, media cetak dan elektronik yang berbasis teknologi serta pemanfaatan event yang berskala besar untuk menarik perhatian pangsa pasar potensial seperti Rusia, China dan Korea.

Realisasi capaian Sasaran Strategis 3 untuk dua Tahun sebelumnya yakni Tahun 2012 dan Tahun 2013 sebagaimana nampak pada **Tabel III-6** mengalami fluktuatif seperti misalnya pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan selama dua Tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang fluktuatif pada Tahun 2012 sebesar 8,37 %, lalu kemudian pada Tahun 2013 menurun menjadi 7,65 %. Demikian pula untuk Tahun 2014 menurun menjadi 7,57 %. Namun demikian, dalam kurun waktu 2009-2013 pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan selalu berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yaitu 5,78 % pada Tahun 2013. Hal ini menunjukkan kinerja pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan telah melampaui kinerja Nasional, bahkan mengalami peningkatan pertumbuhan yang tinggi pada Tahun 2012 ketika pertumbuhan nasional menurun. Peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut berdampak pada meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat Sulawesi Selatan dalam kurun waktu dua Tahun terakhir yakni sebesar Rp.19,37 juta Tahun 2012 meningkat menjadi Rp. 31,01 juta di Tahun 2013 dan untuk Tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 35,59 juta. Selain itu besarnya nilai PDRB Tahun 2014 ini menjadikan Sulawesi Selatan sebagai salah satu provinsi yang cukup berpotensi, secara nominal nilai PDRB Sulawesi Selatan masuk dalam sepuluh besar provinsi-provinsi dengan nilai PDRB tertinggi, dan untuk wilayah Sulampua merupakan yang tertinggi.

Provinsi yang masuk dalam kategori lima besar, hal ini dikarenakan kontribusi Sulawesi Selatan terhadap Nasional yang mencapai 3 % jika dibandingkan dengan kontribusi empat provinsi lainnya yang kontribusinya kurang dari 2 %. Bahkan kontribusi Sulawesi Barat sebagai provinsi dengan pertumbuhan

ekonomi tertinggi hanya sebesar 0,27 %. Hal ini dapat diartikan bahwa 1 % pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan lebih berarti dibandingkan 1 % pertumbuhan ekonomi di empat provinsi lainnya.

Pendapatan per kapita digunakan untuk melihat tingkat kemakmuran suatu masyarakat yang direfleksikan oleh pendapatan rata-rata yang diterima penduduknya. Semakin tinggi pendapatan per kapita masyarakat maka tingkat kesejahteraan masyarakat juga meningkat pada Tahun 2014 PDRB perkapita Sulawesi Selatan mengalami peningkatan dari 31,01 juta rupiah atau sekitar 2.973 US\$, pada Tahun 2013, maka pada Tahun 2014 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,57 persen, PDRB Perkapita Sulawesi Selatan telah menembus sebesar 35,59 juta rupiah atau sekitar 3.006 US\$. Atau dengan kata lain, pendapatan perkapita penduduk di Sulawesi Selatan adalah sekitar 3 Juta per bulannya.

Dilihat dari sisi nilai ekspor Sulawesi Selatan dalam lima Tahun terakhir yakni Tahun 2009-2013, nilai ekspor Sulawesi Selatan berfluktuasi yakni dari US\$ 1.34 juta pada Tahun 2009 mengalami peningkatan menjadi US\$ 2.02 juta pada Tahun 2010, kemudian pada Tahun 2011 dan Tahun 2012 mengalami penurunan hingga menjadi US\$ 1,77 juta dan US\$ 1,45 juta, namun hingga akhir Tahun sejak Januari hingga Desember 2013 nilai ekspor Sulawesi Selatan sedikit mengalami peningkatan mengingat nilai ekspor daerah ini telah mencapai US\$ 1.58 juta. Penurunan nilai ekspor dari Tahun 2011 ini disebabkan karena menurunnya peran komoditas nikel terhadap ekspor Sulawesi Selatan. Apabila nilai ekspor Sulawesi Selatan dilihat dari jenis komoditas yang diekspor khususnya Tahun 2012, nampak bahwa ekspor daerah ini didominasi oleh komoditas sektor pertanian dan perikanan seperti kakao, kopi dan komoditas hasil perikanan seperti ikan, udang, teripang, telur ikan terbang. Dilihat dari negara tujuan ekspor maka Jepang merupakan negara tujuan ekspor utama Sulawesi Selatan disusul Malaysia, China dan Singapura.

Selain potensi komoditas pada sektor pertanian, potensi pariwisata di Sulawesi Selatan sangat beraneka ragam jenisnya dan juga kaya akan keragaman budaya yang merupakan pula potensi unggulan daerah yang cukup memberikan kontribusi terhadap nasional mengenai jumlah kunjungan wisatawan Mancanegara dan wisatawan Nusantara. Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Provinsi

Sulawesi Selatan telah berupaya menjadikan Sulawesi Selatan sebagai salah satu daerah tujuan wisata (DTW) terkemuka di Indonesia, sejajar dengan destinasi utama di Indonesia lainnya seperti Bali. Seperti diketahui bahwa di daerah ini terdapat DTW utama yakni Tana Toraja dan Taman Laut Takabonerate, dan untuk mendorong peningkatan jumlah kunjungan wisata di kedua DTW tersebut Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menetapkan kegiatan Tahunan yakni “Lovely December” serta “Festival Takabonerata”. Dengan dilaksanakannya kedua event tersebut, maka Kementerian Pariwisata RI telah menetapkan Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara sebagai salah satu dari lima destinasi terbaik Indonesia, dan Lovely December serta Festival Takabonerate dijadikan sebagai event tetap (calender of event) pariwisata nasional. Di samping itu sebagai salah satu faktor pendukung pengembangan kepariwisataan di Sulawesi Selatan, Bandara Sultan Hasanuddin ditetapkan sebagai salah satu dari lima belas pintu masuk pariwisata di Indonesia karena ketersediaan fasilitas pendukung yang dimiliki. Dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan, maka potensi pariwisata di Sulawesi Selatan cukup memberi kontribusi terhadap nasional. Salah satu dampak dari apa yang telah diupayakan tersebut terlihat jumlah wisatawan yang berkunjung di daerah ini selama kurun waktu beberapa Tahun terakhir yakni dari Tahun 2009-2013, telah mengalami peningkatan sekitar 20 % yakni dari 2,75 juta wisatawan pada Tahun 2009 meningkat menjadi 5,49 juta wisatawan pada Tahun 2013.

Tabel III-6

Realisasi Capaian Sasaran Strategis 3 Tahun 2012 - 2014

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian Tahun 2012 - 2014		
			2012	2013	2014
1	Jumlah Investasi (ADHB)	Rp	8.144.168.200.000	5.268.483.537.000	7.951.701.120.000
2	Nilai PDRB (ADHB)	Rp	137,39 M	184,783 M	300,1 T
3	Jumlah pendapatan perkapita (ADHB)	Rp	19,37 juta	31,01 juta	35,59 juta
4	Indeks paritas Daya Beli	Rp	643,59 ribu	645,63 ribu	5 %
5	Persentase pertumbuhan Ekonomi	%	8,37	7,65	7,57

6	Peningkatan pertumbuhan industri Pengolahan	%	1,13	1,05	2
7	Peningkatan nilai ekspor perdagangan	M.USD	1,45	1,58	1,65
8	Persentase pertumbuhan sektor pertanian	%	2,17	1,92	1,92
9	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	Kjg	64.601	106.584	151.763
10	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Kjg	4.871.966	5.385.809	5.920.528
11	Jumlah obyek yang telah difasilitasi untuk menjadi destinasi pengembangan obyek wisata unggulan Sulsel	Obyek	8	4	8

Terhadap capaian target Tahun 2014 jika dibandingkan dengan target sampai Tahun akhir periode RPJMD pada umumnya capaian tersebut telah mendekati dengan nilai yang diharapkan, misalnya untuk indikator kinerja peningkatan nilai ekspor perdagangan, pencapaian Tahun 2014 sebesar 1,65 M USD jika dibandingkan dengan kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD telah mencapai 77,68 % dari target yang diinginkan yaitu 2,124 M USD. Selanjutnya untuk indikator kinerja jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang ditargetkan mencapai 170.000 kunjungan pada akhir periode RPJMD, jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2014 sebesar 115.763 kunjungan, kondisi kinerja yang dicapai telah mencapai 68,09 %. Untuk indikator kinerja jumlah kunjungan wisatawan nusantara, pencapaian Tahun 2014 adalah 5.920.000 kunjungan, apabila dibandingkan dengan target yang diinginkan pada akhir periode RPJMD yaitu 7.000.000 kunjungan telah mencapai kondisi 84,57 %. Untuk indikator kinerja Jumlah obyek yang telah difasilitasi untuk menjadi destinasi pengembangan obyek wisata unggulan Sulawesi Selatan, pencapaian Tahun 2014 adalah 8 obyek, jika dibandingkan dengan target yang diinginkan pada akhir periode RPJMD yaitu 9 obyek telah mencapai kondisi 88,88 % dari target.

Usulan pemecahan masalah yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis 2 secara umum adalah :

1. UPT Pelayanan dan Perizinan Terpadu yang memberi kemudahan kepada masyarakat dan dunia usaha dalam memperoleh pelayanan perizinan, terbitnya Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal yang menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif, sehingga mampu meningkatkan penyerapan investasi di Sulawesi Selatan, ikut serta dalam event pameran promisi investasi baik di dalam maupun di luar negeri untuk menarik minat investor, pro aktif dalam menangani permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan PMDN dan PMA, memberi informasi yang dibutuhkan oleh calon investor mengenai potensi dan peluang investasi di Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Perlu adanya peningkatan akselerasi dan sinergitas terutama pada seluruh stakeholder yang terkait dalam mendorong peningkatan semua sektor pendukung sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat seperti halnya peningkatan produksi semua komoditas terutama komoditas unggulan sehingga berdampak pula pada peningkatan pendapatan per kapita dan terkendalinya inflasi.
3. Untuk mengatasi rendahnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, maka perlu diupayakan pengembangan industri berbasis komoditas pada wilayah-wilayah tertentu, dengan harapan bahwa nilai tambah produksi sektor pertanian akan dapat meningkat yang tentunya akan berdampak pula pada peningkatan pendapatan petani.
4. Perlunya penataan dan peningkatan kualitas destinasi wisata menyangkut daya tarik dan daya saingnya. Daya tarik yang dimaksud adalah pengemasan event dan membenahi obyek yang dikunjungi sedangkan daya saing yang dimaksud merupakan pelayanan penyelenggaraan wisata dan keterjangkauan harga paket yang ditawarkan.
5. Perlunya upaya-upaya yang lebih berdaya saing, agar destinasi di Sulawesi Selatan, khususnya Toraja dapat dibangkitkan daya tariknya seperti sebelumnya, salah satunya dengan melengkapi sarana dan prasarana

pendukung pada destinasi pariwisata serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia stakeholder pariwisata melalui berbagai workshop dan pelatihan.

6. Perlunya upaya-upaya promosi yang lebih intensif, baik melalui promosi langsung, partisipasi pada event atau pameran, media cetak dan elektronik, juga dibutuhkan kolaborasi atau kerjasama promosi dengan berbagai lembaga-lembaga terkait yang memiliki jaringan kuat.

Upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian target Sasaran Strartegis ini melalui program sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 8.590.983.290,-
2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja SKPD dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 342.000.000,
3. Program Pengembangan Perekonomian Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 3.258.415.000,-
4. Program Pengembangan Data dan Informasi jumlah anggaran sebesar Rp. 1.137.685.000,-
5. Program Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 42.460.885.400,-
6. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 3.474.700.000,-
7. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 5.227.593.000,-
8. Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.063.240.000,-

Tabel III-7

SASARAN STRATEGIS 4
Meningkatnya Kualitas dan Meluasnya Kesempatan Kerja

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Penurunan angka pengangguran terbuka hingga	5,7persen	5,08 persen	112,2%
2	Penurunan jumlah penduduk miskin	7 - 8 persen	10,32	129 %
3	Pertumbuhan penduduk	1,2 persen (8,34 juta jiwa)	1,34 % (8.432.163 jiwa)	111,6 %
4	Persentase angkatan kerja yang bekerja	di atas 2-3 persen	1,5 persen	75 %
5	Jumah LPK dalam mengoptimalkan fungsi balai latihan kerja/lembaga pelatihan kerja (LPK)	4 LPK	4 LPK	100 %
6	Jumlah penempatan TK untuk memperluas kerjasama dgn dunia usaha terkait peluang TK	100.000 orang	114.960 orang	114,96 %
7	Penyediaan data dan informasi pasar kerja yang dapat di akses oleh pencari kerja (Informasi Pasar Tenaga Kerja)	24 Kab/kota	24 Kab/kota	100 %
8	Jumlah pencari kerja mengikuti diklat untuk peningkatan keterampilan dan skill	600 orang	420 orang	70 %

Berdasarkan pengukuran pencapaian **sasaran strategis 4** yaitu “ **Meningkatnya Kualitas dan Meluasnya Kesempatan Kerja** “, Capaian kinerja Sasaran Strategis 4 **sebesar 101,59 %** atau tercapai dengan kualifikasi **Sangat Baik**. Meskipun ada beberapa indikator kinerja yang belum mencapai target, namun terdapat 4 (empat) indikator kinerja yang melampaui target sebagaimana tergambar dalam **Tabel III-7** di atas.

Kondisi tersebut di atas secara umum disebabkan antara lain oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Perluasan kesempatan kerja yang belum optimal, produktivitas dan kompetensi tenaga kerja masih belum memadai
2. Pelatihan berbasis kompetensi belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena adanya kendala teknis pelaksanaan dan dukungan sarana dan prasarana pelatihan yang sudah lanjut.
3. Masih rendahnya tingkat pengupahan diperusahaan yang masih di bawah UMP/UMK.

Berkaitan dengan agenda pembangunan dalam RPJMD, maka sasaran Perluasan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja sangat terkait dengan agenda Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat. Selain mampu mendorong perbaikan beberapa indikator makro daerah, maka pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai mendorong pula terbukanya lapangan pekerjaan, dan salah satu indikator yang dapat dilihat adalah dengan semakin berkurangnya angka pengangguran di daerah ini. Tingkat pengangguran terbuka di Sulawesi Selatan selama dua Tahun terakhir terus mengalami penurunan yang cukup besar yakni dari Tahun 2012 tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,9 %, kemudian turun menjadi 5,1 % pada Tahun 2013 hingga sampai akhir Tahun 2014 tingkat pengangguran terbuka daerah ini menjadi 5,08 %. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicapai mampu mendorong terciptanya lapangan kerja baru sehingga tenaga kerja yang ada dapat diserap. Penduduk usia kerja di Sulawesi Selatan atau penduduk yang berusia 15 hingga Tahun 2013 berjumlah 5,67 juta jiwa. Nampak bahwa pertumbuhan penduduk usia kerja di daerah ini rata-rata mengalami peningkatan sekitar 0,40 %.

Demikian halnya dengan penempatan Tenaga Kerja untuk memperluas kerjasama dengan dunia usaha terkait peluang Tenaga Kerja jumlahnya semakin meningkat sejak Tahun 2012 sebanyak 30.904 orang, pada Tahun 2013 sebanyak 31.503 orang dan Tahun 2014 meningkat sebanyak 114.960 orang. Perbandingan

jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja diperoleh rasio penduduk yang bekerja. Rasio penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja selama Tahun 2012-2014 mengalami peningkatan setiap Tahun. Rasio penduduk yang bekerja pada Tahun 2012 sebesar 94,13 %, kemudian pada Tahun 2013 rasio penduduk yang bekerja sementara berada pada posisi 94,90 %. Dari angka tersebut, terdapat 94,9 % dari angkatan kerja yang memperoleh kesempatan kerja, sedangkan sisanya 5,1 % masih mencari kerja atau pengangguran.

Membbaiknya perekonomian daerah yang mendorong peningkatan daya beli masyarakat Sulawesi Selatan tersebut, menggambarkan pula bahwa kemiskinan di daerah semakin berkurang. Hal ini terlihat pada hasil publikasi BPS Sulawesi Selatan yang menggambarkan bahwa jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan dalam kurun waktu Tahun 2009-2013 telah berkurang 106 ribu jiwa lebih yakni dari 963 ribu jiwa lebih pada Tahun 2009 berkurang menjadi 857 ribu jiwa lebih pada Tahun 2013, atau dapat pula dikatakan bahwa jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan dalam kurun waktu lima Tahun terakhir telah berkurang sekitar 1,99 %. Dilihat dari persentase jumlah penduduk miskin Sulawesi Selatan, nampak bahwa pada Tahun 2009 penduduk miskin daerah ini masih mencapai 12,31 persen, kemudian pada Tahun 2014 persentase penduduk miskin telah mengalami penurunan sekitar 10,32 %.

Jumlah penduduk Sulawesi Selatan dari Tahun ke Tahun terus mengalami peningkatan, dimana pada Tahun 2012 8,19 juta jiwa, kemudian pada Tahun 2013 jumlah penduduk Sulawesi Selatan berada pada angka 8,34 juta jiwa. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk Sulawesi Selatan dalam kurun waktu dua Tahun terakhir bertambah rata-rata sebesar 1,34 % per Tahun.

Adapun realisasi capaian dua Tahun terakhir yakni Tahun 2012 dan Tahun 2013 untuk Sasaran Strategis 4 dapat dilihat pada **Tabel III-8**.

Tabel III-8

Realisasi Capaian Sasaran Strategis 4 Tahun 2012 - 2014

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian Tahun 2012 - 2014		
			2012	2013	2014
1	Penurunan angka pengangguran terbuka hingga	%	5,9	5,1	5,08
2	Penurunan jumlah penduduk miskin	%	10,11	10,32	10,32
3	Pertumbuhan penduduk	%	1,34	1,34	1,34
4	Persentase angkatan kerja yang bekerja	%	1,5	2,3	1,5
5	Jumah LPK dlm mengoptimalkan fungsi balai latihan kerja/lembaga pelatihan kerja (LPK)	LPK	2	4	4
6	Jumlah penempatan TK untuk memperluas kerjasama dengan dunia usaha terkait peluang TK	Orang	30.904	31.503	114.960
7	Penyediaan data dan informasi pasar kerja yang dapat di akses oleh pencari kerja (Informasi Pasar Tenaga Kerja)	Kab/ Kota	24	24	24
8	Jumlah pencari kerja mengikuti diklat untuk peningkatan keterampilan dan skill	Orang	350	560	420

Terhadap capaian target Tahun 2014 jika dibandingkan dengan target yang diinginkan sampai Tahun akhir periode RPJMD pada umumnya telah sesuai dengan yang diharapkan, misalnya untuk indikator kinerja penurunan angka pengangguran terbuka, pencapaian Tahun 2014 sebesar 5,8 % jika dibandingkan dengan kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD yaitu sebesar 5,3 % telah mendekati dari target yang diinginkan.

Usulan pemecahan masalah terhadap hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis 4 adalah :

1. Optimalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) dan Lembaga Latihan Kerja (LLK) baik yang dikelola secara langsung oleh Pemerintah maupun swasta dengan melakukan berbagai jenis pelatihan guna meningkatkan kompetensi tenaga kerja.
2. Pengembangan sistem kerjasama kemitraan antara dunia usaha dengan lembaga pelatihan agar dapat lebih banyak menyerap tenaga kerja yang terlatih dan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
3. Penetapan upah minimum regional yang disesuaikan dengan kemampuan perusahaan.

Upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian target Sasaran Strategis ini melalui program sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 3.001.900.000,-
2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja SKPD dengan jumlah anggaran sebesar Rp.1.074.100.000,-
3. Program Pembinaan Hubungan Industrial Tenaga Kerja dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.775.475.000,-

Tabel III-9

SASARAN STRATEGIS 5
Efektifnya Kelembagaan Ekonomi Berbasis Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah wirausaha dalam pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif koperasi dan UMKM	72.405 orang	22.700 orang	31,35 %
2	Jumlah promosi produksi dalam membangun mekanisme perdagangan dan kelembagaan pasar yang sehat dan berpihak pada pelaku usaha	4 kali promosi	4 kali promosi	100 %
3	Jumlah SDM pelaku UKM serta koperasi mengikuti diklat	6.500 orang	6.370 orang	98 %
4	Jumlah UMKM Mandiri	1.650 unit usaha	1.625 unit usaha	98,48 %

5	Jumlah koperasi dan UMKM yang terfasilitasi oleh lembaga keuangan bank dan non bank	150.150 unit	150.125 unit	99,98 %
6	Jumlah produk baru yang difasilitasi sarana dan prasarana dan mendapatkan HAKI yang mengatur pengembangan dan pembinaan koperasi dan UMKM	101 produk	98 produk	97,02 %

Berdasarkan pengukuran pencapaian **Sasaran Strategis 5** yaitu “ **Efektifnya Kelembagaan Ekonomi Berbasis Masyarakat** ” dengan 6 (enam) indikator kinerja secara umum belum tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja Sasaran Strategis 5 **sebesar 71,05 %** atau tercapai dengan kualifikasi **Cukup**.

Kondisi tersebut di atas secara umum disebabkan antara lain oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Kemampuan setiap daerah berbeda dalam hal penganggaran serta kemampuan SDM pengelola Koperasi dan UMKM masih di bawah standar yang dipersyaratkan.
2. Masih banyak Koperasi dan UMKM yang belum mampu memenuhi persyaratan dari lembaga keuangan
3. Para pengelola Koperasi dan UMKM belum mampu menyiapkan dokumen yang menjadi persyaratan dari lembaga pemberi izin atau bantuan.

Gambaran tentang meningkatnya akses masyarakat khususnya golongan ekonomi lemah terhadap sumber permodalan tergambar pada semakin berkembangnya Koperasi dan UMKM serta jumlah kredit yang telah disalurkan oleh dunia perbankan kepada masyarakat kecil melalui lembaga tersebut. Jumlah UMKM yang ada di Sulawesi Selatan terus mengalami peningkatan dari Tahun ke Tahun, dimana pada Tahun 2012 jumlah UMKM di daerah ini terus mengalami peningkatan mencapai 916.232 unit atau tumbuh sebesar 3,58 % dari Tahun sebelumnya, pada Tahun 2013 jumlah UMKM di Sulawesi Selatan mencapai 949.056 unit.

Demikian pula jumlah UMKM menurut jenis usaha yang berskala mikro, kecil dan menengah juga terus mengalami peningkatan, Tahun 2012 mencapai 797.021 unit, pada Tahun 2013 jumlah usaha mikro di Sulsel mencapai 823.233 unit, atau tumbuh sebesar 3,29 %. Demikian halnya usaha kecil juga mengalami peningkatan dari Tahun ke Tahun, dimana pada Tahun 2012 menjadi 112.657 atau tumbuh sebesar 5,20 %, dan pada Tahun 2013 jumlah usaha kecil mencapai 118.517 unit. Demikian pula untuk jenis usaha skala menengah juga mengalami peningkatan dari Tahun ke Tahun, pada Tahun 2012 menjadi 916. 500 unit atau tumbuh sebesar 3,59 %, dan pada Tahun 2013 akan meningkat menjadi 949.426 unit.

Hingga saat ini diperkirakan jumlah koperasi yang masih aktif di Sulawesi Selatan pada Tahun 2013 sebesar 5.772 dan pada Tahun 2012 meningkat sebesar 5.554, dengan demikian jumlah koperasi yang masih aktif di daerah ini terus meningkat dari Tahun ke Tahun dengan peningkatan sebesar 3,92 %. Persentase koperasi aktif di Sulawesi Selatan mengalami peningkatan dari Tahun ke Tahun yakni dari Tahun 2012 sebesar 67,87 % dan pada Tahun 2013 persentase koperasi aktif akan meningkat menjadi 69,65 %

Tabel III-10

Realisasi Capaian Sasaran Strategis 5 Tahun 2012 - 2014

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian Tahun 2012 - 2014		
			2012	2013	2014
1	Jumlah wirausaha dalam pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif koperasi dan UMKM	Orang	22.700	22.700	22.700
2	Jumlah promosi produksi dalam membangun mekanisme perdagangan dan kelembagaan pasar yang sehat dan berpihak pada pelaku usaha	promosi	4 kali	4 kali	4 kali
3	Jumlah SDM pelaku UKM serta koperasi mengikuti diklat	orang	6.370	6.370	6.370
4	Jumlah UMKM Mandiri	Unit	1.625	1.625	1.625

5	Jumlah koperasi dan UMKM yang terfasilitasi oleh lembaga keuangan bank dan non bank	Unit	150.125	150.125	150.125
6	Jumlah produk baru yang difasilitasi sarana dan prasarana dan mendapatkan HAKI yang mengatur pengembangan dan pembinaan koperasi dan UMKM	produk	98	98	98

Terhadap capaian target Tahun 2014 jika dibandingkan dengan target sampai Tahun akhir periode RPJMD yaitu Tahun 2018, terdapat capaian target yang masih membutuhkan perbaikan kinerja, yaitu untuk indikator jumlah wirausaha dalam pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif koperasi dan UMKM, pencapaian Tahun 2014 sebesar 22.700 orang yang jika dibandingkan dengan kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD yaitu sebesar 313.845 baru mencapai 7,23 % dari target. Selanjutnya untuk indikator lainnya pada umumnya telah menunjukkan kinerja yang memadai, misalnya indikator jumlah UMKM mandiri, pencapaian Tahun 2014 sebesar 1.625 unit jika dibandingkan dengan kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD yaitu sebesar 2.250 unit usaha telah mencapai 72,22 % dari target. Untuk indikator kinerja jumlah Koperasi dan UMKM yang terfasilitasi oleh lembaga keuangan bank dan non bank, pencapaian Tahun 2014 sebesar 150.125 unit, jika dibandingkan dengan kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD yaitu sebesar 150.750 unit usaha telah mencapai 99,58 %.

Usulan pemecahan masalah terhadap hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis 4 adalah :

1. Melakukan pembinaan terhadap Koperasi dan UMKM, sehingga dapat memenuhi persyaratan yang dibutuhkan baik oleh Lembaga Keuangan maupun Lembaga Pemberi Izin dan bantuan.
2. Mengadakan lebih banyak diklat dalam rangka peningkatan kualitas pengelola Koperasi dan UMKM.

Upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian target Sasaran Strategis ini melalui program sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.577.612.050,-
2. Program Penciptaan Iklim Usaha Yang Kondusif dan Pengembangan Produk Bagi Koperasi dan UMKM dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.411.865.000,-
3. Program Peningkatan Daya Saing SDM dan Peningkatan Kepada Sumber Daya Produktifitas bagi Koperasi dan UMKM dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 900.000.000,-
4. Program Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.161.699.000,-

Tabel III-11

SASARAN STRATEGIS 6
Terluasnya Infrastruktur Wilayah dan Ketersediaan Energi

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase kondisi kemantapan dan kualitas jalan	82,50 persen	85,37 persen	103,47%
2	Persentase kinerja kapasitas dan kualitas jaringan jalan	85,79 persen	85,79 persen	100 %
3	Persentase perwujudan pembangunan sarana dan prasarana angkutan darat	10 persen	5 persen	50 %
4	Persentase peningkatan kualitas dan kapasitas prasarana dan fasilitasi bandar udara	72 persen	72 persen	100 %
5	Jumlah peningkatan kualitas lingkungan perumahan pada kawasan permukiman	18 kawasan permukiman	64 kawasan permukiman	355,56%

6	Jumlah penyediaan dan pengolahan Air baku guna mendukung ketahanan pangan	120 embung, 2 cek dam, 2 bangunan pelindung	38 embung	31,6%
7	Persentase rumah tangga menggunakan jangkauan layanan air bersih	83,26 persen	87,27 persen	104,93%
8	Persentase rumah tangga terhadap akses prasarana sanitasi yang layak	76,78 persen	82,61 persen	107 %
9	Persentase rumah tangga serta ketataan energi yang ditunjang dengan penyediaan listrik	67,00 persen	89,22 persen	133,16%
10	Kapasitas ketersediaan jaringan irigasi	74.234 Ha	74.234 Ha	100 %
11	Jumlah pengamanan dalam pengendalian banjir dan pengamanan pantai	1.500 bronjong, 20.000 karung plastik berisi pasir	500 bronjong 12.000 karung plastik berisi pasir	46,66%

Berdasarkan pengukuran pencapaian **Sasaran Strategis 6 “ Terluasnya Infrastruktur Wilayah dan Ketersediaan Energi “** dengan 11 (sebelas) indikator kinerja secara umum dapat dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja Sasaran Strategis 6 **sebesar 112,03 %** atau tercapai dengan kualifikasi **Sangat Baik**.

Kondisi tersebut di atas secara umum disebabkan antara lain oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Kurangnya kesadaran pengguna jalan, khususnya angkutan barang dengan mengangkut muatan lebih (over loading) yang memberi andil dalam mempercepat kerusakan jalan, adanya hambatan dalam proses pengadaan lahan baik untuk pelebaran jalan sub standart maupun pembangunan jalan baru, adanya bencana alam pada beberapa ruas jalan, hal inimengakibatkan penurunan kondisi jalan provinsi dan haru segera mendapatkan penanganan agar tidak semakin parah, banyaknya ruas jalan provinsi yang sudah melewati umur rencana sehinggamembutuhkan penanganan dengan lebih baik.

2. Kondisi umum saluran induk dari jaringan irigasi masih terdapat beberapa bagian saluran yang mengalami kerusakan, serta perlu adanya penetapan yang jelas mengenai status saluran itu sendiri, kebutuhan data hidrologi yang berkualitas semakin meningkat dalam pengelolaan banjir, namun kenyataannya kualitas data hidrologi yang diperoleh pada umumnya masih rendah.
3. Terbangunnya Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Kabupaten Jeneponto, dengan kapasitas 2 x 100 Mega Watt, adanya Program Listrik Perdesaan dengan kegiatan penyambungan baru jaringan listrik untuk daerah terpencil, adanya pembangunan Pembangkit Listrik Mini Hidro di Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Tana Toraja oleh pihak swasta.

Berkaitan dengan infrastruktur khususnya ketersediaan maupun kualitas infrastruktur jalan, dapat digambarkan bahwa panjang jalan di Sulawesi Selatan mencapai 2.816,36 km dan terdiri dari 1.556,13 km atau 55,25 % berupa jalan nasional serta 1.260,23 km atau 44,75 % berupa jalan provinsi. Apabila kondisi jalan tersebut diperhatikan maka 45,84 % jalan yang tersedia dalam kondisi baik, 33,17 % dalam kondisi sedang, dan rusak ringan 14,88 %, serta rusak berat mencapai 5,40 %, sementara jalan yang belum tembus mencapai 0,72 % atau kurang lebih 20 km. Melihat kondisi tersebut maka dapat dikatakan kualitas jalan di daerah ini sedikit mengalami penurunan khususnya jalan yang merupakan jalan nasional.

Sebagai daerah lumbung pangan, maka infrastruktur irigasi berupa jaringan irigasi, bangunan irigasi merupakan hal yang sangat penting di daerah ini. Total areal irigasi di Sulawesi Selatan mencapai 418.170 ha berupa areal potensi bahu, 300.084 ha berupa areal potensial, 248.053 ha berupa luas areal irigasi yang belum potensial. Sementara panjang saluran irigasi di daerah ini, terdiri dari saluran induk 867.492 m, saluran pembawa sepanjang 2.072.611 m, dan saluran pembuangan mencapai 2.264.825 m, serta saluran suplesi 83.936m. Bangunan irigasi yang tersedia yang mencakup bangunan utama berjumlah 240 buah, pintu utama 580 buah, bangunan gendong 97 buah, bangunan suplesi 179 buah, dan bangunan pembuangan berjumlah 3.662 buah.

Sebagai Pintu Gerbang Kawasan Timur Indonesia (KTI), Sulawesi Selatan saat ini telah ditetapkan sebagai hub jalur penerbangan di KTI dan hal ini telah didukung pula dengan ketersediaan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, dan hingga saat ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan didukung Pemerintah Pusat sedang melaksanakan pembangunan bandara khususnya dalam mendukung pengembangan kepariwisataan.

Berkaitan dengan ketersediaan energi listrik, maka dapat dilihat pada indikator energi utama yakni rasio elektrifikasi. Rasio ini menggambarkan tingkat keterlayanan rumahtangga terhadap kebutuhan listrik. Di Provinsi Sulawesi Selatan, Rasio Elektrifikasi pada Tahun 2012 sebesar 85,77 %, pada Tahun 2013 mencapai 87,02 % dan pada Tahun 2014 mencapai 89,22 % melebihi target 67,00% sehingga capaian kinerja sebesar 133,16 %. Untuk meningkatkan rasio elektrifikasi di daerah ini, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengembangkan pemanfaatan sumberdaya energi alternatif melalui program pengembangan desa mandiri energi, khususnya pada daerah-daerah yang belum terjangkau layanan PLN. Pemenuhan kebutuhan tenaga melalui energi listrik terbarukan tersebut merupakan upaya pemanfaatan sumberdaya energi yang tersedia guna mewujudkan desa mandiri energi.

Salah satu indikator sasaran dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan adalah layanan air bersih, dan sepanjang Tahun 2009-2013 capaian indikator ini telah mengalami peningkatan dari Tahun ke Tahun. Khusus layanan air bersih untuk rumah tangga dalam pada Tahun 2012 mencapai 82,40 %, sementara Tahun 2013 mencapai 85,87 % dan pada Tahun 2014 mencapai 87,27 % melampaui target yang ditetapkan sebesar 83,26 % dengan tingkat capaian 104,93 %.

Tabel III-12
Realisasi Capaian Sasaran Strategis 6 Tahun 2012 - 2014

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian Tahun 2012 - 2014		
			2012	2013	2014
1	Persentase kondisi kemantapan dan kualitas jalan	%	84,57	85,04	85,37
2	Persentase kinerja kapasitas dan kualitas jaringan jalan	%	83,60	83,60	85,79
3	Persentase perwujudan pembangunan sarana dan prasarana angkutan darat	%	2	4	5
4	Persentase peningkatan kualitas dan kapasitas prasarana dan fasilitasi bandar udara	%	65	70	72
5	Jumlah peningkatan kualitas lingkungan perumahan pada kawasan pemukiman	kawasan	25	30	64
6	Jumlah penyediaan dan pengolahan Air baku guna mendukung ketahanan pangan	embung cek dam bangunan pelindung	76 1 -	50 1 1	38 - -
7	Persentase rumah tangga menggunakan jangkauan layanan air bersih	%	82,40	85,87	87,27
8	Persentase rumah tangga terhadap akses prasarana sanitasi yang layak	%	75,28	81,08	82,61
9	Persentase rumah tangga serta ketataan energi yg ditunjang dengan penyediaan listrik	%	85,77	87,02	89,22
10	Kapasitas ketersediaan jaringan irigasi	Ha	74.234	74.234	74.234
11	Jumlah pengamanan dalam pengendalian banjir dan pengamanan pantai	bronjong, karung plastik	800 10.000	564 10.000	500 12.500

Terhadap capaian target Tahun 2014 jika dibandingkan dengan target yang diinginkan sampai Tahun akhir periode RPJMD Tahun 2018 pada umumnya capaian tersebut telah sesuai dengan yang diharapkan, misalnya untuk indikator

persentase kondisi kemantapan dan kualitas jalan, capaian Tahun 2014 sebesar 85,37 % jika dibandingkan dengan kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD yaitu sebesar 92,03 % telah mencapai 92,76 % dari target. Selanjutnya untuk indikator persentase rumah tangga menggunakan jangkauan layanan air bersih, pencapaian Tahun 2014 sebesar 87,27 % jika dibandingkan dengan kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD yaitu sebesar 86,22 % telah mencapai 101,2 %. Untuk indikator persentase rumah tangga terhadap akses prasarana sanitasi yang layak, pencapaian Tahun 2014 sebesar 82,61 % jika dibandingkan dengan kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD yaitu sebesar 80 % telah mencapai 103,26 % dari target. Sementara untuk indikator persentase rumah tangga serta ketataan energi yang ditunjang dengan penyediaan listrik, pencapaian Tahun 2014 sebesar 85,39 % jika dibandingkan dengan kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD yaitu sebesar 75 % telah mencapai 113,8 % dari target.

Upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian target Sasaran Strategis ini melalui program sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Jalan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 703.611.811.369,-
2. Program Pembangunan Transportasi Massal dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 63.184.779.000,-
3. Program Pengembangan/Pemereliharaan Sarana/Prasarana dan Pengawasan Transportasi Udara dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 838.775.000,-
4. Program Pengembangan Perumahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.116.642.640.500,-
5. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.991.520.000,-
6. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 26.483.433.350,-
7. Program Pembinaan dan Pengembangan Desa Mandiri Energi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.128.534.000,-

Tabel III-13

SASARAN STRATEGIS 7
Menguatnya Ekonomi Wilayah dan Meningkatnya Produksi
Berbasis Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Supporting pertumbuhan agroindustri yang berbasis sumberdaya lokal	4 kab/kota	4 kab/kota	100 %
2	Jumlah pengembangan lembaga ekonomi	226 BUMDES	292 BUMDES	129,2 %
3	Jumlah kelompok tani yang menjalankan usaha agrobisnis pedesaan	10 kelompok tani	10 kelompok tani	100 %
4	Jumlah kerjasama antar kawasan andalan	1 MoU	2 MoU	200 %

Berdasarkan pengukuran pencapaian **sasaran strategis 7 " Menguatnya Ekonomi Wilayah dan Meningkatnya Produksi Berbasis Masyarakat "** dengan 4 (empat) indikator kinerja tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan bahkan terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang melampaui target yaitu Jumlah Pengembangan Lembaga Ekonomi tingkat capaian 129,2 % dan Jumlah Kerjasama Antar Kawasan Andalan sebesar 200 %. Capaian kinerja Sasaran Strategis 7 **sebesar 132,3 %** atau tercapai dengan kualifikasi **Sangat Baik**.

Kondisi tersebut di atas secara umum disebabkan antara lain oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Peningkatan jumlah BUMDES di Sulawesi Selatan pada Tahun 2014 didorong oleh adanya fasilitator untuk membentuk 5 (lima) BUMDES di setiap Kabupaten dan Kota, terutama dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Kesepakatan kerjasama atau MoU yang sudah ditandatangani bersama belum ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama sebagai dasar untuk saling mengikat antara kedua belah pihak, koordinasi pelaksanaan kerjasama belum optimal disebabkan karena intensitas komunikasi dan kunjungan kerja masih sangat terbatas.

3. Pencapaian kelompok tani yang menjalankan agrobisnis di pedesaan berdasarkan realisasi Tahun 2014 sebanyak 6 kelompok tani dari 10 kelompok tani yang ditargetkan, hal ini disebabkan karena peserta yang dibimbing dan memenuhi syarat untuk dilakukan pembinaan hanya 6 kelompok.

Tabel III-14

Realisasi Capaian Sasaran Strategis 7 Tahun 2012 - 2014

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian Tahun 2012 - 2014		
			2012	2013	2014
1	Supporting pertumbuhan agroindustri yang berbasis sumberdaya lokal	Kab/kota	4	4	4
2	Jumlah pengembangan lembaga ekonomi	BUMDES	174	190	292
3	Jumlah kelompok tani yang menjalankan usaha agrobisnis pedesaan	kelompok	8	8	6
4	Jumlah kerjasama antar kawasan andalan	MoU	Tidak ada	Tidak ada	2

Terhadap capaian target Tahun 2014 jika dibandingkan dengan target yang diinginkan sampai Tahun akhir periode RPJMD Tahun 2018 pada umumnya capaian tersebut telah sesuai dengan yang diharapkan, misalnya untuk indikator jumlah pengembangan lembaga ekonomi, pencapaian Tahun 2014 sebesar 292 BUMDES jika dibandingkan dengan kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD yaitu sebesar 426 BUMDES telah mencapai 68,54 % dari target.

Usulan pemecahan masalah terhadap hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran Strategis 7 adalah :

1. Mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk membina lebih banyak kelompok tani/usaha untuk penanganan pasca panen sistem jaminan mutu melalui proses Standar Operasional Prosedur (SOP) Sanitasi Standar Operasional Prosedur (SSOP), Good Handling Practices (GHP), Good Manufacture Practice (GMP) agar di pedesaan tumbuh sumber-sumber pendapatan baru dan meningkatkan ekonomi petani dan masyarakat pada umumnya serta mengusulkan alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut baik APBD maupun APBN.

2. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi kerjasama agar supaya MoU yang telah disepakati dan ditandatangani bersama ditindaklanjuti menjadi perjanjian kerjasama.

Upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian target Sasaran Strategis ini melalui program sebagai berikut :

1. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000,-
2. Program Pengembangan Perekonomian Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.258.415.000,-
3. Program Pembinaan Kelembagaan Ekonomi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 614.031.000,-

Tabel III-15

SASARAN STRATEGIS 8
Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam
dan Gerakan Sulsel Hijau

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	20 persen	20 persen	100 %
2	Persentase pengembangan kapasitas dalam pengelolaan lingkungan hidup	20 persen	20 persen	100 %
3	Fasilitasi pembangunan perhutanan sosial dalam peningkatan kualitas pengelolaan hutan berbasis pemberdayaan masyarakat	4.000 Ha	5.025,66 Ha	125,64 %
4	Rehabilitasi lahan kritis dalam peningkatan kualitas pengelolaan hutan	469.885 Ha	494.973 Ha	105,33 %
5	Persentase peningkatan kapasitas perlindungan dan pengamanan hutan dan konsevasi SDA	20 persen	20 persen	100 %
6	Pemeliharaan batas kawasan hutan	300 km	260 km	86,66 %

7	Pengendalian kebakaran kerusakan hutan dan lahan	360,78 Ha	211,50 Ha	179,56 %
8	Koordinasi peningkatan kualitas pengelolaan B3 dan limbah B3	9 kab/kota	24 kab/kota	266,67 %

Berdasarkan pengukuran pencapaian **sasaran strategis 8** yaitu **“ Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Gerakan Sulsel Hijau “** dengan 8 (delapan) indikator kinerja secara umum dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja Sasaran Strategis 8 **sebesar 132,98 %** atau tercapai dengan kualifikasi **Sangat Baik**.

Kondisi tersebut di atas secara umum disebabkan antara lain oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Masih adanya kawasan hutan yang telah dicadangkan untuk pengelolaan hutan berbasis pemberdayaan masyarakat yang belum dikelola karena terkendala pada minat masyarakat untuk mengelola hutan masih kurang.
2. Masih banyaknya konflik kawasan seperti batas kawasan hutan yang belum mendapat pengakuan dari masyarakat, adanya tumpang tindih antara kawasan hutan dengan peruntukan pengembangan sektor lain.
3. Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat khususnya yang bermukim di dalam dan di sekitar kawasan hutan terhadap peraturan bidang kehutanan.
4. Masih terbatasnya minat masyarakat dalam mengembangkan potensi hasil hutan yang ada seperti hasil hutan bukan kayu antara lain sutera alam, lebah madu, rotan, getah pinus, damar dan lain-lain.
5. Penurunan beban pencemaran ini diperoleh dari peningkatan ketaatan pemrakarsa yang dibina dan diawasi terhadap pemenuhan baku mutu limbah.
6. Indikator pengembangan kapasitas dalam pengelolaan lingkungan hidup ini dihitung terhadap peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi kelembagaan, penganggaran, peraturan daerah, sumber daya manusia, sarana dan prasarana. Berdasarkan bobot kapasitas pengelolaan lingkungan hidup Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 berada pada nilai 3,34 meningkat 20 % dari nilai Tahun 2013 yaitu 2,78.

7. Indikator Koordinasi peningkatan kualitas pengelolaan B3 dan limbah B3 dicapai dengan melaksanakan pembinaan dan koordinasi pengelolaan limbah B3 pada 24 kabupaten dan kota, melakukan workshop tata cara perizinan pengelolaan limbah B3 dan pembinaan berupa pemberian rekomendasi 2 (dua) perusahaan dan kunjungan lapangan 8 (delapan) kab/kota antara lain PT. Lonsum Kabupaten Bulukumba, PT. Vale Kabupaten Luwu Timur, PT. Pertamina Parepare, PLTU Barru, PLTU Jeneponto, PT. Tonasa Kabupaten Pangkep, Equity dan Energi Sengkang Kabupaten Wajo.

Tabel III-16

Realisasi Capaian Sasaran Strategis 8 Tahun 2012 - 2014

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian Tahun 2012 - 2014		
			2012	2013	2014
1	Persentase pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	%	20	20	20
2	Persentase pengembangan kapasitas dalam pengelolaan lingkungan hidup	%	20	20	20
3	Fasilitasi pembangunan perhutanan sosial dalam peningkatan kualitas pengelolaan hutan berbasis pemberdayaan masyarakat	Ha	5.025,66	9,887,23	707,42
4	Rehabilitas lahan kritis dalam peningkatan kualitas pengelolaan huan	Ha	494.973	573.699	525.885
5	Persentase peningkatan kapasitas perlindungan dan pengamanan hutan dan konsevasi SDA	%	20	20	20
6	Pemeliharaan batas kawasan hutan	Km	260	542	130
7	Pengendalian kebakaran kerusakan hutan dan lahan	Ha	211,50	119,50	77,50
8	Koordinasi peningkatan kualitas pengelolaan B3 dan limbah B3	Kab/ Kota	24	24	24

Usulan pemecahan masalah terhadap hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis 8 adalah :

1. Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih dinilai kurang baik kualitas maupun kuantitas dibanding dengan beban kerja yang dilaksanakan seperti misalnya Tenaga Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan dan perluasan ruang lingkup akreditasi disadari masih minim demikian halnya dengan Tenaga Pengawas Lingkungan Hidup, Tenaga Perencana, Tenaga Informasi Teknologi dan tenaga teknis lainnya, untuk itu pada Tahun 2014 telah dilakukan penerimaan PNS untuk memenuhi kebutuhan tersebut di atas.
2. Belum optimalnya ketersediaan data yang ada di SKPD untuk menunjang perencanaan dan pengambilan kebijakan, solusi alternatif direncanakan pada Tahun 2015 akan dibangun sistem data base yang terpadu dan terintegrasi untuk menunjang proses pelaksanaan kegiatan.
3. Perlunya dilakukan reviu perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan yang selanjutnya diusulkan ke Kementerian Kehutanan untuk mendapatkan kejelasan status kawasan hutan.
4. Perlunya dilakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang kehutanan pada Tingkat Tapak sehingga pemahaman dan kesadaran masyarakat dan stakeholder terhadap aturan tersebut lebih meningkat.

Upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian target Sasaran Strartegis ini melalui program sebagai berikut :

1. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.222.665.000,-
2. Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.026.565.000,-
3. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.222.665.000,-
4. Program Rencana Makro dan Pemantapan Kawasan Hutan
5. Program Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam

6. Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai Berbasis Pemberdayaan Masyarakat.

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan masyarakat Sulawesi Selatan yang semakin sejahtera, Tahun 2014 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengalokasikan Belanja Daerah sebesar Rp. 6.084.919.513.173,76 dapat direalisasikan sebesar Rp. 5.600.386.775.837,72 atau 92,03 %, sebagai catatan angka realisasi adalah angka sebelum audit oleh BPK RI. Selengkapnya dapat dilihat dari uraian berikut ini :

Aspek Pendapatan Daerah

Hingga akhir Tahun 2014, realisasi Pendapatan Daerah mencapai Rp. 5.503.150.792.786,78 atau kurang dari target yang ditetapkan sebelumnya sebesar Rp. 5.650.575.561.606 atau mencapai 97,39 %. Dari jumlah realisasi pendapatan daerah tersebut, masing-masing kelompok pendapatan daerah memberikan kontribusi sebagai berikut :

1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2014 sebesar Rp. 3.029.111.625.216,78 atau sebesar 96,81 % dari target pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 3.128.864.413.872,00.
2. Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2014 sebesar Rp. 1.531.386.240.824,00 atau sebesar 97,19 % dari target dana perimbangan yang direncanakan yakni sebesar Rp. 1.575.574.370.734,00.
3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah Tahun 2014 sebesar Rp. 946.136.777.000,00 mencapai sebesar Rp. 942.652.926.746,00 atau sebesar 99,63 %.

Aspek Belanja Daerah

Dalam Tahun 2014 realisasi Belanja Daerah mencapai Rp. 5.600.386.775.837,72 atau sebesar 92,03 % dari rencana anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 6.084.919.513.173,76. Dari jumlah realisasi tersebut Belanja Tidak Langsung terealisasi sebesar Rp. 3.446.840.488.397,62 atau 96,41 %, sementara Belanja

Langsung terealisasi sebesar Rp. 2.153.546.287.440,10 atau sebesar 85,79 %, selengkapnya dapat dilihat dari uraian sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung, dalam Tahun 2014, realisasi Belanja Tidak Langsung mencapai Rp. 3.446.840.488.397,62 atau 96,41 % dari rencana anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 3.574.931.948.363,65. Dari jumlah realisasi tersebut, Belanja Pegawai dapat direalisasikan sebesar Rp. 852.198.957.100,00 atau sebesar 96,73 %, Belanja Bunga dapat direalisasikan sebesar Rp. 16.151.416.303,19 atau sebesar 73,41 %, Belanja Hibah dapat direalisasikan sebesar Rp. 950.682.805.000,00, Belanja Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota dapat direalisasikan sebesar Rp.1.101.354.583.380,43, Belanja Bantuan Keuangan dapat direalisasikan sebesar Rp. 525.489.443.114,00, dan Belanja Tidak Terduga dapat direalisasikan sebesar Rp. 963.283.500,00.
2. Belanja Langsung, dalam Tahun 2014, realisasi Belanja Langsung mencapai Rp. 2.153.546.287.440,10 atau sebesar 85,79 % dari rencana anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 2.509.987.564.810,11. Dari jumlah realisasi tersebut, Belanja Pegawai dapat direalisasikan sebesar Rp. 168.276.410.908,47, Belanja Barang dan Jasa dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.309.032.667.480,63, dan Belanja Modal dapat direalisasikan sebesar Rp. 676.237.209.051,00.

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan Umum atas Capaian Kinerja

Secara umum Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, kinerjanya dikategorikan **Baik dan Sangat Baik** (dengan kisaran Nilai 84 -132).

Sehubungan dengan hal tersebut, berikut ini disampaikan ikhtisar hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran Strategis Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 sebagai berikut :

Tabel IV-1
Simpulan Umum atas Capaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Nilai Capaian	Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kebutuhan Dasar	84,78%	Baik
2.	Meningkatnya Mutu dan Produktivitas Hasil Pertanian	99,51 %	Sangat Baik
3.	Terdorongnya Industri Pengolahan Bebas Suber Daya Lokal	122,05 %	Sangat Baik
4.	Meningkatnya Kualitas dan Meluasnya Kesempatan Kerja	101,59 %	Sangat Baik
5.	Efektifnya Kelembagaan Ekonomi Berbasis Masyarakat	71,05 %	Cukup
6.	Terluasnya Infrastruktur Wilayah dan Ketersediaan Energi	112,03 %	Sangat Baik
7.	Menguatnya Ekonomi Wilayah dan Meningkatnya Produksi Berbasis Masyarakat	132,30 %	Sangat Baik
8.	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Gerakan Sulsel Hijau	132,98 %	Sangat Baik

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja terhadap 8 Sasaran Strategis dimaksud, sebanyak 6 Sasaran Strategis dengan capaian kinerja dalam kategori **Sangat Baik**, dan sebanyak 1 Sasaran Strategis capaian kinerja dalam kategori **Baik**, dan 1 Sasaran Strategis capaian kinerja dalam kategori **Cukup**.

B. Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja

Terhadap kondisi tersebut di atas, langkah-langkah peningkatan kinerja di masa mendatang yang perlu dilaksanakan adalah :

1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sesuai prinsip Good Governance, menempatkan masyarakat sebagai subyek atau pelaku pembangunan.
2. Peningkatan pelayanan publik melalui perbaikan standar-standar pelayanan, SDM serta pembangunan infrastruktur pendukungnya.
3. Penciptaan kondisi wilayah yang semakin kondusif dalam berinvestasi serta dalam mendukung aktivitas perekonomian daerah.
4. Pengembangan ekonomi kerakyatan dengan pendekatan komoditas unggulan daerah dan kawasan yang didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur, Koperasi dan UMKM serta Pariwisata.
5. Pembangunan database kinerja yang handal, baik pada tingkat pemerintah daerah maupun pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah sehingga tersedia data yang akurat. Data akurat mendukung pengambilan kebijakan daerah sesuai kondisi dan kebutuhan.
6. Peningkatan koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun Pemerintah Kabupaten dan Kota sehingga tercipta sinergitas dalam pencapaian kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Demikian Laporan Kinerja ini disusun, semoga bermanfaat dan menjadi acuan bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di masa yang akan datang.

Makassar, Maret 2015

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.Si., M.H.

Lampiran - Lampiran